



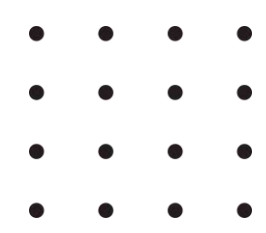
**BerAKHLAK** #bangga  
melayani  
bangsa  
Berorientasi Pelayanan, Berkeadilan, Berkompetensi,  
Harmonis, Loyal, Adaptif, Inovatif

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)



## TAHUN 2023

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
2024





## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karuniaNya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Strategis Tahun 2018-2023 serta Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Semarang, Januari 2024

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**



**RAHMAH NUR HAYATI, S.K.M, M.Kes**

Pembina Tingkat I

NIP. 19680520 199203 2 005

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER. ....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Mandat Kinerja, Proses Bisnis, dan Struktur Organisasi .....	2
1.3 Isu-Isu Strategis.....	6
1.4 Dukungan SDM, Sarpras dan Anggaran .....	9
1.5 Sistematika Penulisan .....	12
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022....	13
1.7 Langkah Perbaikan Internal OPD.....	14
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD.....	15
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan .....	19
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	21
2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....	23
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023 .....	31
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	45
3.3 Inovasi.....	45
3.4 Penghargaan.....	46
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	49
4.2 Rekomendasi.....	50
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023</b>	
<i>Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023</i>	ii

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.4.1a Jumlah PNS BKD berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin ...	10
Tabel 1.4.1b Jumlah PNS BKD berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin .	10
Tabel 1.4.1c Jumlah PNS BKD berdasarkan Usia.....	11
Tabel 1.4.1d Sarana dan Prasarana .....	11
Tabel 1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022.....	13
Tabel 1.7 Langkah Perbaikan Internal OPD .....	14
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....	19
Tabel 2.2.1 Perencanaan Kinerja Tahun 2023.....	19
Tabel 2.2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2023.....	17
Tabel 2.2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2023.....	20
Tabel 2.3.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	22
Tabel 2.3.2 Program/Kegiatan dan Anggaran .....	23
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja.....	31
Tabel 3.1.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.....	32
Tabel 3.1.2 Realisasi Kinerja serta Capaian 3 Tahun Terakhir .....	34
Tabel 3.1.3 Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah .....	37
Tabel 3.1.4 Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional.....	38
Tabel 3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan .....	38
Tabel 3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	40
Tabel 3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan .....	41
Tabel 3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2023 .....	45
Tabel 3.4 Penghargaan Tahun 2023 .....	47



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Cascading Kinerja BKD .....	3
Gambar 2 Cascading Kinerja Pada Sekretariat BKD .....	3
Gambar 3 Peta Proses Bisnis .....	5
Gambar 4 Peta Realisasi Proses Bisnis .....	5
Gambar 5 SOTK BKD .....	6
Gambar 6 Rasio Jumlah PNS BKD .....	9
Gambar 7 Grafik Capaian Kinerja 2021-2023 .....	35
Gambar 8 SINIAS .....	46

# BAB I PENDAHULUAN

---

## 1.1 Latar Belakang

---

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan penyelenggara manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengelola kepegawaian daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian.

Secara singkat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah perangkat daerah yang melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah yaitu keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh BKD Provinsi Jawa Tengah;

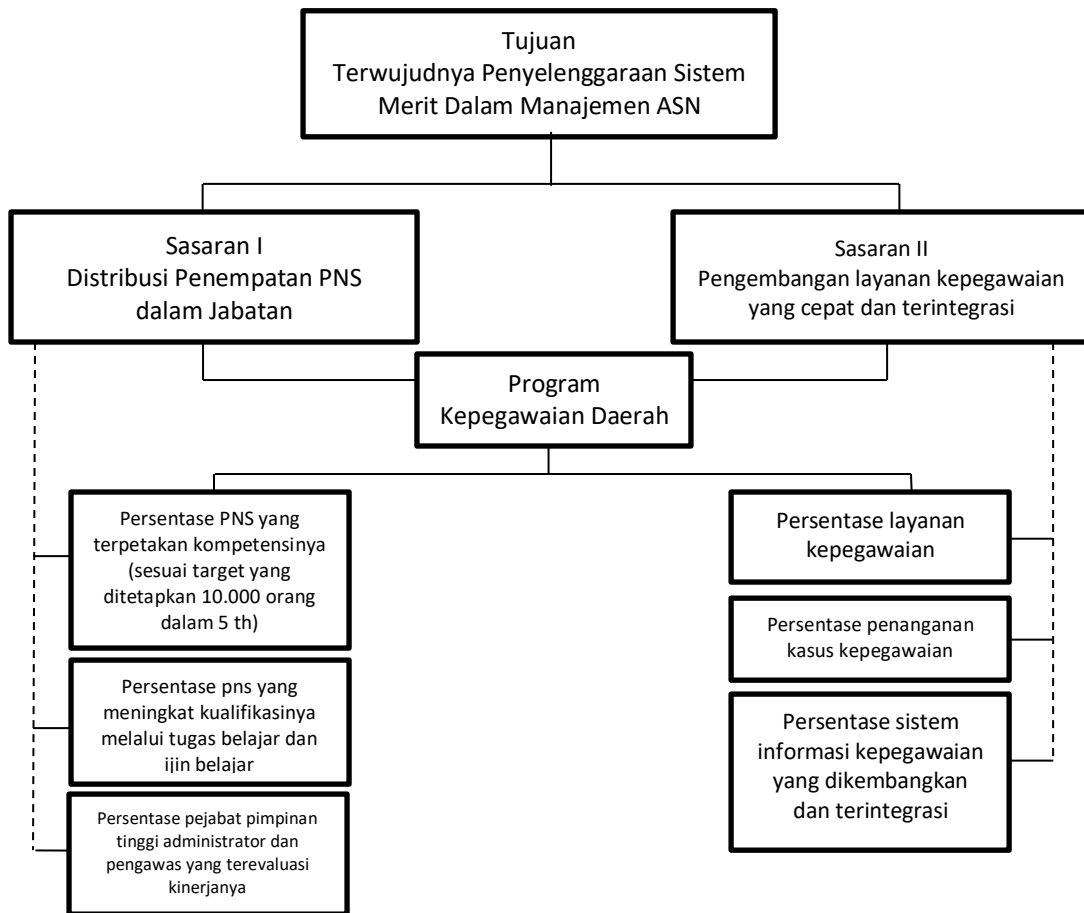


2. Mendorong BKD Provinsi Jawa Tengah di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BKD Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Memberikan kepercayaan kepada PNS di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap BKD Provinsi Jawa Tengah di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan, pengelolaan, dan pembinaan bidang kepegawaian.

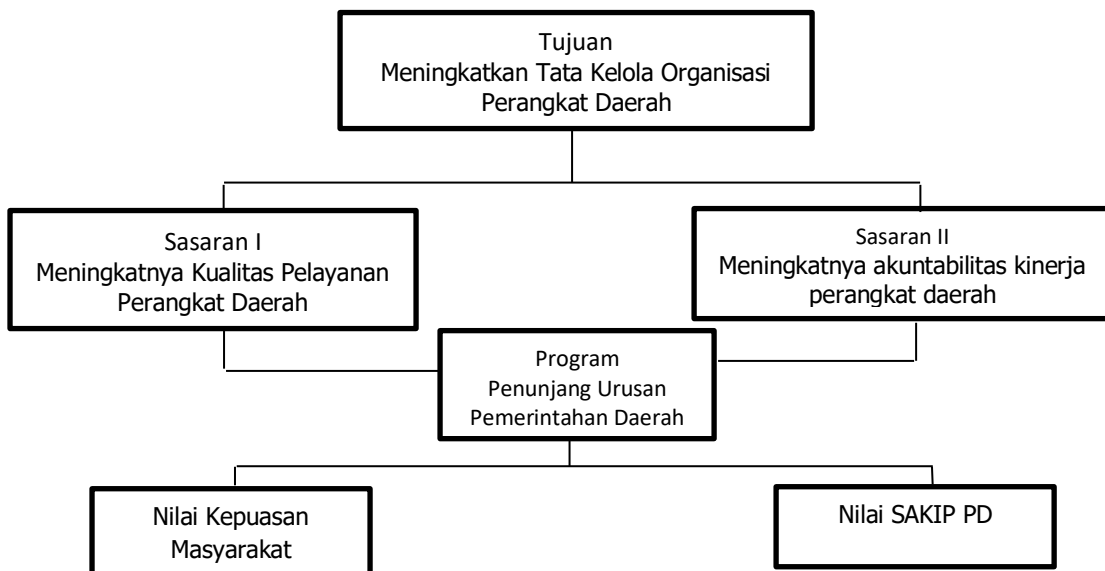
## **1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi**

Selaras dengan paradigma *Performance Based Organization* (organisasi berbasis kinerja), maka setiap perangkat daerah dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, tujuan dan sasaran pembangunan. Cascading Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan bentuk keseriusan dalam upaya peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2023. Sehingga kedepannya dalam melaksanakan program dan kegiatan harus berdasarkan kinerja yang berorientasi kepada hasil yang dapat dipertanggungjawabkan bagi kesejahteraan sumber daya aparatur.

Gambar 1 Cascading Kinerja BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023



Gambar 2 Cascading Kinerja BKD Prov. Jateng pada Sekretariat Tahun 2023



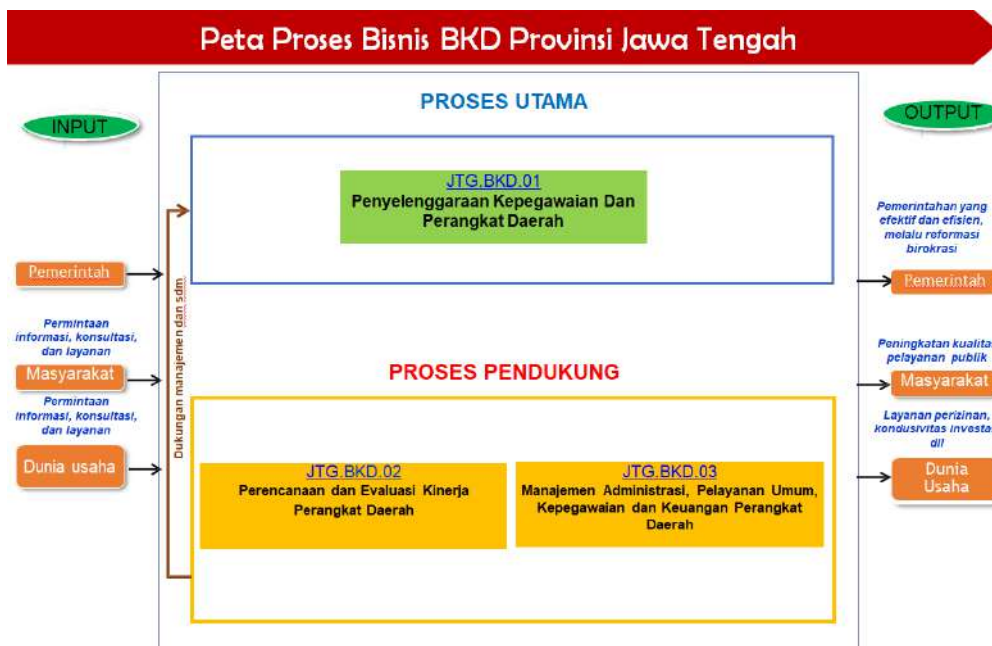


Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawaian;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawaian;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawaian;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawaian;
- e. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan badan ; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi BKD Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Gambar 3 Peta Proses Bisnis



Gambar 4 Peta Realisasi Proses Bisnis

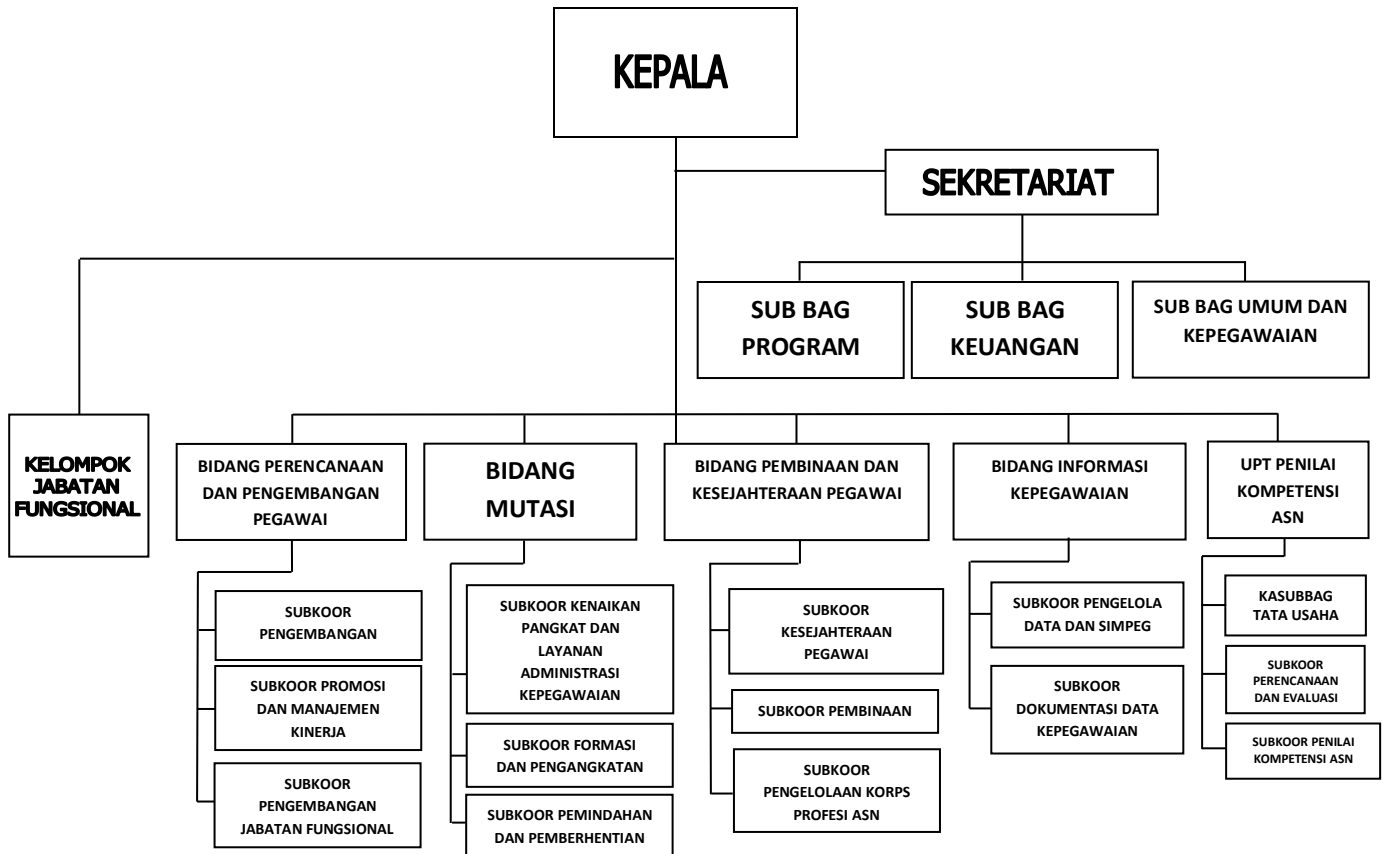


Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki Fungsi strategis yaitu sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah.



Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKD Provinsi Jawa Tengah, adalah sebagai berikut :

*Gambar 5 SOTK BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023*



### 1.3 Isu-Isu Strategis

Isu strategis atau permasalahan utama merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Sesuai dengan Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, BKD telah menetapkan isu strategis pada dokumen Renstra BKD yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi BKD Provinsi Jawa Tengah antara lain sebagai berikut :

1. Belum optimalnya implementasi manajemen kepegawaian seiring masih belum adanya beberapa peraturan turunan atas amanah Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan komitmen untuk mengimplementasikan Sistem Merit;
2. Pendistribusian pegawai yang belum optimal yang disebabkan antara lain belum selesainya Analisa Beban Kerja dan Analisa Jabatan yang merupakan kewenangan OPD terkait;
3. Kebutuhan kerja kolaboratif dan terintegrasi termasuk dengan Pusat dan Kabupaten/Kota guna peningkatan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan ASN untuk pelayanan publik yang lebih baik, dalam upaya percepatan pencapaian target pembangunan daerah serta dalam rangka menghadapi perubahan yang cepat di era industri 4.0, agar mampu bersaing dengan Standarisasi Pelayanan ASEAN;
4. Masih terdapat Mismatch antara kebutuhan spesifikasi jabatan dan kualifikasi PNS dalam Jabatan sehingga perlu pemetaan dan penataan pegawai yang tepat serta membangun konsep pengembangan karir yang berkualitas mendasarkan manajemen talenta;
5. Konsekuensi meningkatnya jumlah kasus kepegawaian paska pelimpahan kewenangan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D);
6. Kebutuhan sarpras (hardware/software) dan infrastruktur IT untuk peningkatan digitalisasi layanan kepegawaian yang cepat, mudah, murah, terintegrasi dan paperless sesuai tuntutan dan perkembangan teknologi.

Seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini, serta dinamika kebijakan terkait kepegawaian yang berubah dengan cepat, pada Tahun 2023, BKD Provinsi Jawa Tengah masih dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan di bidang kepegawaian. Guna meningkatkan kualitas layanan

kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Dinamika kebijakan terkait perencanaan dan pengadaan ASN yang tidak dapat diprediksi setiap tahunnya, dimana hal ini sepenuhnya merupakan kebijakan pemerintah pusat yang tidak dapat diintervensi;
2. Optimalisasi pengembangan karir ASN melalui Manajemen Talenta ASN, baik dari aspek akuisisi, pengembangan, retensi dan penempatan maupun monitoring dan evaluasi;
3. Implementasi sistem penilaian kinerja individu ASN yang mendukung kinerja organisasi dan sebagai dasar dalam pengembangan karir;
4. Peningkatan kualitas layanan administrasi kepegawaian melalui digitalisasi dan integrasi sistem informasi;

Berdasarkan uraian di atas, maka didapat isu-isu strategis yang dihadapi BKD Provinsi Jawa Tengah antara lain:

1. Adanya dinamika kebijakan kepegawaian di tingkat pusat yang kemudian berdampak pada daerah, misalnya terkait dengan perubahan kebijakan penerimaan CASN menjadi P3K;
2. Penyelesaian tenaga non ASN direncanakan harus selesai pada akhir tahun 2024, sedangkan sampai dengan akhir tahun 2023 pemerintah belum menentukan arah kebijakan yang pasti;
3. Ditetapkannya UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang mencabut UU No. 5 Tahun 2014 yang berdampak pada perubahan pelaksanaan manajemen ASN sehingga diperlukan penyempurnaan Manajemen ASN;
4. Pengembangan karir ASN belum berjalan optimal, sehingga diperlukan penyesuaian dan penyempurnaan skema pengembangan karir ASN melalui manajemen talenta;
5. Belum tersedianya *database* potensi dan kompetensi untuk seluruh ASN, dan hasil penilaian potensi dan kompetensi belum sepenuhnya dijadikan dasar dalam pengembangan karir ASN;

6. Penilaian kinerja individu ASN belum mampu memotret kinerja riil ASN, sehingga belum mampu mendukung kinerja organisasi dan belum dijadikan sebagai dasar dalam pengembangan karir;
7. Perlunya peningkatan kualitas sistem informasi Layanan kepegawaian dari sisi sarpras, infrastruktur, jaringan, sekuritas, dan penancangan penggunaan kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*), dalam seluruh layanan kepegawaian.

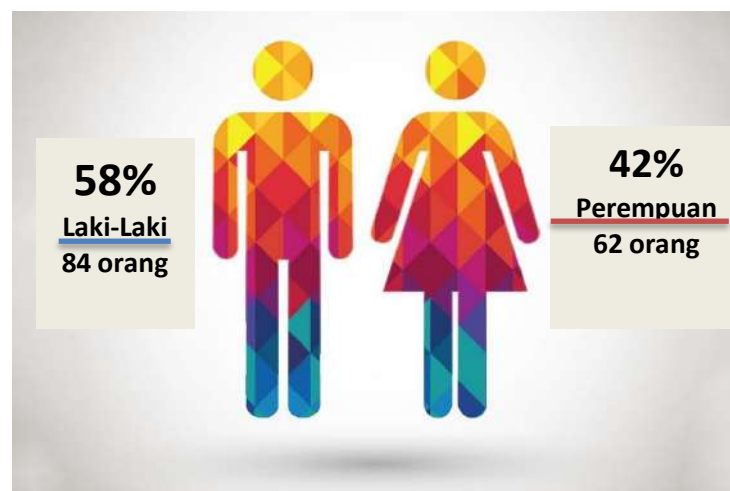
#### **1.4 Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran**

---

Adanya aspek sumber daya perangkat daerah yaitu BKD Provinsi Jawa Tengah didukung sumber daya baik berupa sumber daya manusia/aparatur dan sarana prasarana yang memadai.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh Kepala Badan yang membawahi Sekretariat, 4 (empat) bidang dan 1 Unit Pelaksana Teknis (UPT). Jumlah PNS BKD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 146 orang (per 1 Januari 2024) yang terdiri dari :

*Gambar 6 Rasio Jumlah PNS BKD Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin*



*Sumber : BKD Provinsi Jawa Tengah bulan Januari tahun 2024*

**Tabel 1.4.1a****Jumlah PNS Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin**

Golongan	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
I	1	0	1
II	8	6	14
III	62	55	117
IV	13	1	14
<b>JUMLAH</b>	<b>84</b>	<b>62</b>	<b>146</b>

Sumber : BKD Provinsi Jawa Tengah bulan Januari tahun 2024

**Tabel 1.4.1b****Jumlah PNS Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin**

Pendidikan	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
SD	2	0	2
SMP	0	0	0
SMA	12	0	12
D1	0	0	0
D2	0	0	0
Sarmud/DIII	3	9	12
D4	11	5	16
SM.Non Ak	0	0	0
SM.Ak	0	0	0
STRATA 1	24	36	60
STRATA 2	32	12	44
STRATA 3	0	0	0
<b>JUMLAH</b>	<b>84</b>	<b>62</b>	<b>146</b>

Sumber : BKD Provinsi Jawa Tengah bulan Januari tahun 2024



**Tabel 1.4.1c**  
**Jumlah PNS Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah**  
**Berdasarkan Usia**

Usia	Jumlah
<20-40 Tahun	73
41 - 55 Tahun	58
> 55 Tahun	15
<b>Jumlah</b>	<b>146</b>

*Sumber : BKD Provinsi Jawa Tengah bulan Januari tahun 2024*

**Tabel 1.4.1d**  
**Sarana dan Prasarana BKD Provinsi Jawa Tengah**

NO.	Sarana dan Prasarana	Jenis
1.	Bangunan dan Gedung Kantor sejumlah 10 unit	a. 5 unit berupa Kantor Induk dan bangunan penunjang b. 3 unit bangunan di kompleks BPSDMD Srandol c. 1 Unit Rumah Dinas d. 1 unit Taman Rumah Dinas
2.	Bangunan dan Gedung BKD Prov. Jateng di Jl. Stadion Selatan No 1 Semarang	a. Gedung kantor induk b. Bangunan Diesel c. Bangunan Koperasi dan Kantin d. Bangunan ATK e. Bangunan Gudang
3.	Bangunan dan Gedung Di Kompleks BPSDMD Srandol Jl. Setiabudi 201 A Semarang	a. Bangunan dokumentasi data b. Rumah genset c. Gedung TMMK
4.	Rumah Dinas Jl. Nangka Timur I No. 4 Semarang	a. 1 Rumah Dinas b. 1 unit Taman Rumah Dinas
5.	Kendaraan Dinas roda 4 (empat)	17 unit
6.	Kendaraan Dinas roda 2 (dua)	10 unit
7.	Peralatan Kantor: a. Laptop b. Komputer c. Printer d. UPS e. LCD f. Sound system g. CCTV h. PABX i. Finger Print j. Pesawat Telepon k. Air Conditioner (AC) l. Genset m. Rool Opec	77 unit 339 unit 129 unit 211 unit 11 unit 5 unit 11 set 2 unit 10 unit 41 buah 142 unit 3 unit 19 unit

*Sumber : BKD Provinsi Jawa Tengah bulan Desember 2023*

Anggaran pada **Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah** Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp. **47.519.256.000,-**. Secara Umum Sarana Prasarana yang dimiliki dan alokasi anggaran mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja BKD Provinsi Jawa Tengah. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

---

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2023, dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**Bab I Pendahuluan** menjelaskan tentang Latar Belakang, Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi Kedudukan, Isu-Isu Strategis, Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran, dan Sistematika Penulisan; Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023; Langkah Perbaikan Internal OPD.

**Bab II Perencanaan** menjelaskan tentang Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD, Strategi dan Arah Kebijakan, Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dan Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.

**Bab III Akuntabilitas Kinerja** menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi, Efisiensi Anggaran, Inovasi dan Penghargaan.

**Bab IV Penutup** menjelaskan Kesimpulan, Rekomendasi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

## 1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan penguatan akuntabilitas Instansi Pemerintah, BKD Provinsi Jawa Tengah mengacu dan mempedomani Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 sebagai bahan perbaikan pada tahun mendatang. Berdasarkan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 BKD Provinsi Jawa Tengah yang telah disampaikan, Evaluator SAKIP memberikan 6 (enam) saran/rekomendasi kepada BKD Provinsi Jawa Tengah dan telah dilakukan upaya tindak lanjut sebagaimana tabel berikut:

**1.6 Tabel Tindak Lanjut atas LHE SAKIP Tahun 2023**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Memberikan aspek legalitas terhadap dokumen yang dikeluarkan oleh BKD Provinsi Jawa Tengah	BKD telah melakukan perbaikan pada dokumen perencanaan dan evaluasi pada BKD Provinsi Jawa Tengah dengan memberikan aspek legalitas
2.	Memaksimalkan laman/website BKD Provinsi Jawa Tengah untuk mengunggah dokumen, terutama dokumen SAKIP	BKD telah memaksimalkan laman website BKD Provinsi Jawa Tengah untuk menyediakan informasi bagi publik salah satunya dokumen SAKIP, Adapun bukti dukung sebagaimana terlampir
3.	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja terendah setiap tahapan	BKD telah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala atas capaian kinerja fisik dan keuangan dalam bentuk rakor pengendalian, dan ter-report secara system di econrolling
4.	Membuat Pakta Integritas bagi seluruh pegawai	Seluruh pegawai di lingkungan BKD Provinsi Jawa Tengah telah membuat pakta integritas Tahun 2024
5.	Membuat Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Penyusunan SAKIP	BKD telah menyiapkan SOP pengumpulan data SAKIP di tahun 2024
6.	Menindaklanjuti rekomendasi langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi	BKD telah melaksanakan rekomendasi yang diberikan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan di tahun 2024

## 1.7 Langkah Perbaikan Internal OPD

Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi/saran LKjIP Tahun 2022, BKD Provinsi Jawa Tengah telah melakukan perbaikan internal OPD pada tahun 2023 sebagai berikut:

**1.7 Tabel Langkah Perbaikan Internal OPD**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Penyesuaian dan peyempurnaan kebijakan pengembangan karir pasca kebijakan penyederhanaan birokrasi diterapkan di tahun pertama	Menyiapkan konsep sistem kerja baru bagi ASN Provinsi Jawa Tengah yaitu FWA (Fleksibel Working Arrachment)
2.	Konsolidasi intensif dengan Pemerintah Pusat terkait dengan kebijakan pengadaan ASN dan juga rencana kebijakan penghapusan non ASN di Pemerintah Daerah	Optimalisasi tenaga non ASN ke dalam formasi CASN baik CPNS maupun CPPPK, dan mendorong tenaga non ASN di Provinsi Jawa Tengah untuk melamar di luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
3.	Optimalisasi penilaian potensi dan kompetensi ASN untuk pembangunan data base kompetensi, untuk mendukung penguatan manajemen talenta ASN	Pembangunan Data Base Penilaian Potensi dan Kompetensi dalam Sistem Informasi Pengukuran Kompetensi ASN (SIUMAN)
4.	Penguatan penerapan kinerja ASN, untuk memotret kinerja riil ASN guna mendukung kinerja organisasi dan dasar dalam pengembangan karir ASN	Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem penilaian kinerja ASN (e-kinerja) dengan instrumen penilaian kinerja lainnya yang berbasis kinerja organisasi
5.	Pengembangan dan integrasi aplikasi serta penggunaan kecerdasan buatan ( <i>artificial intelligence/AI</i> ), dalam seluruh layanan kepegawaian dalam merespon dinamika dan perubahan organisasi di masa industri 4.0 dan society 5.0	Restrukturisasi Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg), peningkatan kompetensi SDM pengelola sistem informasi dengan kompetensi teknis yang dibutuhkan dan penggunaan AI pada layanan kepegawaian misalnya penggunaan <i>face recognized</i> pada sistem presensi ASN

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang ada.

### 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Rencana Strategis BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dibuat dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Adapun Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2023 adalah sebagai berikut :



Sumber : Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023



Dalam rangka mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, BKD Provinsi Jawa Tengah ikut berkontribusi dalam pencapaian misi kedua yaitu Memperluas Reformasi Birokrasi melalui Penguatan Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam lingkup bidang kepegawaian. Dalam misi ini mengisyaratkan perlunya Badan Kepegawaian Daerah sebagai Badan yang membantu Pejabat Pembina Kepegawaian dalam melaksanakan manajemen kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah harus mewujudkan fungsi PNS sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan cita-cita tersebut, Badan Kepegawaian Daerah merumuskan gambaran masa depan yang diinginkan untuk mendukung Visi Misi Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Pengembangan Pegawai Yang Obyektif Dan Transparan;  
Dalam rangka mewujudkan perencanaan dan pengembangan pegawai yang obyektif dan transparan, maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kegiatan melalui tahapan dalam manajemen kepegawaian meliputi penyusunan formasi, pelaksanaan pengadaan pegawai secara obyektif dan transparan, penempatan sesuai dengan kompetensinya dan pengembangan PNS berbasis kompetensi.
2. Pelaksanaan Mutasi Kepegawaian Yang Akurat Dan Terukur;  
Mutasi dalam arti sempit adalah perpindahan. Sedangkan dalam konsepsi manajemen kepegawaian dipahami sebagai perubahan status PNS antara lain perubahan status CPNS menjadi PNS, perubahan pangkat PNS, perubahan tempat tugas PNS (*tour of area*), perubahan jenis tugas PNS (*tour of duty*) maupun pemberhentian PNS. Dalam rangka pelaksanaan mutasi PNS dilakukan dengan pengukuran kompetensi dasar dan kompetensi bidang melalui wawancara.
3. Peningkatan Kualitas Pegawai Melalui Pengukuran Kompetensi Dan Penilaian Kinerja;

Untuk mewujudkan peningkatan kualitas pegawai dilakukan melalui pengukuran kompetensi dan penilaian kinerja sebagai salah satu bahan pertimbangan karier untuk penataan PNS dalam jabatan sesuai dengan kompetensinya.

4. Peningkatan Disiplin dan Kesejahteraan serta Pelaksanaan Netralitas Pegawai;

Aparatur Sipil Negara diharapkan menjadi teladan bagi masyarakat, harus bebas dari pengaruh politik praktis dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta harus memiliki loyalitas dan semangat pengabdian yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Untuk mewujudkan loyalitas, pengabdian dan motivasi kerja yang tinggi perlu didukung dengan kesejahteraan yang memadai seiring dengan tuntutan peningkatan kinerja.

5. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian yang Cepat dan Terintegrasi;

Kebijakan Pemerintah tentang implementasi *e-government* menekankan untuk menggunakan teknologi informasi di instansi pemerintah pusat maupun daerah, yang lebih *komprehensif* dan terintegrasi. Penyelenggaraan birokrasi harus dirubah selaras dengan perubahan yang terjadi pada tingkat paradigmatik, yaitu menjadi pemerintahan menuju *good governance*. Melalui pemanfaatan teknologi dan informasi, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah memberikan kontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur yang profesional (berkualitas dan kompeten) agar mampu menyelenggarakan pemerintahan secara bersih, jujur dan transparan melalui pembangunan dan pengembangan sistem informasi pengelolaan data kepegawaian.

Dengan dukungan keakuratan data dan integrasi sistem informasi manajemen kepegawaian beserta sub sistemnya dan penerapan layanan *paperless* akan sangat mendukung percepatan proses pelayanan kepegawaian dan perwujudan *Government Resources Management System* (GRMS).

6. Peningkatan Tertib Administrasi dan Layanan Kepegawaian yang Cepat dan Terintegrasi.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai lembaga yang membidangi kepegawaian bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas manajemen kepegawaian sesuai dengan unsur-unsur yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah mengoptimalkan pelayanan publik untuk mewujudkan lembaga yang komunikatif dalam memberikan pelayanan publik yang prima melalui layanan informasi kepegawaian.

Tahun 2023 merupakan tahun kelima atau tahun akhir masa RPJMD Provinsi Jawa Tengah sekaligus Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah merupakan manifestasi komitmen BKD Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam RPJMD Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun kedepan mengacu pada Renstra Tahun 2018-2023 yaitu:

1. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, maka Tujuan BKD Provinsi Jawa Tengah yang sudah ditetapkan sesuai dengan Renstra Tahun 2018-2023 adalah "Terwujudnya Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen ASN";
2. Sasaran Strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Adapun Sasaran Strategis BKD Provinsi Jawa Tengah yaitu :

- a. Distribusi Penempatan PNS dalam Jabatan
- b. Pelayanan Kepegawaian yang Cepat dan Terintegrasi

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kinerja Pelayanan**  
**BKD Provinsi Jawa Tengah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun Ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen ASN"		Nilai Sistem Merit	268	272	276	280	284
		Distribusi Penempatan PNS dalam Jabatan	Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan	100%	100%	100%	100%	100%
		Pengembangan Layanan Kepegawaian yang cepat dan terintegrasi	Persentase Pengembangan Layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%

## 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam Bab ini menjelaskan tentang tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

**Tabel 2.2.1**  
**Perencanaan Kinerja Tahun 2023**

NO	Tujuan/Sasaran	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
A.	Terwujudnya Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen ASN		Nilai Sistem Merit	Nilai	340
		1. Distribusi Penempatan PNS dalam Jabatan	Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan	%	100%
		2. Pengembangan Layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi	Persentase Pengembangan Layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi	%	100%
B.	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah		Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	89
		1. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	89
		2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	Nilai	81

Pada tahun ketiga pelaksanaan Renstra Tahun 2018-2023 atau pada Tahun 2021, Badan Kepegawaian Daerah dapat melakukan akselerasi dalam pencapaian realisasi indikator tujuan Nilai Sistem Merit dengan nilai 335,5. Sehingga dalam upaya peningkatan kinerja BKD Provinsi Jawa Tengah, maka pada Tahun 2022 ditetapkan perubahan target sebesar 337 dan tahun 2023 sebesar 340 dalam perencanaan kinerja Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.2.1 di atas.

Untuk menjabarkan Tujuan dan Sasaran kinerja pelayanan BKD Provinsi Jawa Tengah dengan lebih konkrit, maka diperlukan strategi dan arah kebijakan agar target sasaran dapat tercapai. Strategi dan arah kebijakan dalam pencapaian sasaran dapat disajikan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2.2.2**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2023**

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Distribusi Penempatan PNS dalam Jabatan	Penetapan kontrak kinerja yang terukur saling terkait berdasarkan level jabatan dari pucuk pimpinan hingga pelaksana (Penjabaran kegiatan tugas jabatan (target kinerja))	Implementasi Manajemen Talenta
		Pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala untuk memastikan tercapainya kontrak kinerja	
		Penyempurnaan metode penilaian kinerja yang obyektif dan terukur dengan e-kinerja	
		Analisis permasalahan kinerja dan strategi penyelesaiannya untuk peningkatan kinerja ASN mendukung kinerja organisasi	
		Menggunakan hasil penilaian kinerja untuk penentuan keputusan terkait pembinaan dan pengembangan karier (promosi, mutasi, demosi, rotasi, pengembangan kompetensi).	
2.	Pengembangan Layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi	Penggajian, penghargaan dan promosi berdasarkan penilaian kinerja dan penegakan disiplin dan kode etik serta kode perilaku pegawai ASN	Penguatan single data simpeg terintegrasi
		Perlindungan dan pemberian kemudahan serta layanan dalam pelaksanaan tugas ASN	Pengembangan portal layanan kepegawaian
		Penyediaan sistem pendukung untuk peningkatan kualitas layanan kepegawaian	Penguatan Sistem informasi dan dokumentasi data kepegawaian



### 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

---

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2023 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Jawa Tengah guna mewujudkan target kinerja sesuai dengan tabel dibawah ini.

**Tabel 2.3.1**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

<b>NO</b>	<b>Tujuan/Sasaran</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
A.	Terwujudnya Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen ASN		Nilai Sistem Merit	Nilai	340
		1. Distribusi Penempatan PNS dalam Jabatan	Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan	%	100%
		2. Pengembangan Layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi	Persentase Pengembangan Layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi	%	100%
B.	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah		Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	89
		1. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	89
		2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	Nilai	81

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2023 telah melaksanakan 2 (dua) program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 46 (empat puluh enam) sub kegiatan yang didukung oleh APBD Provinsi sebesar Rp **47.519.256.000,-** terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) Sub Kegiatan;
2. Program Kepegawaian Daerah terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 18 (delapan belas) Sub Kegiatan;

**Tabel 2.3.2**  
**Program/Kegiatan dan Anggaran**

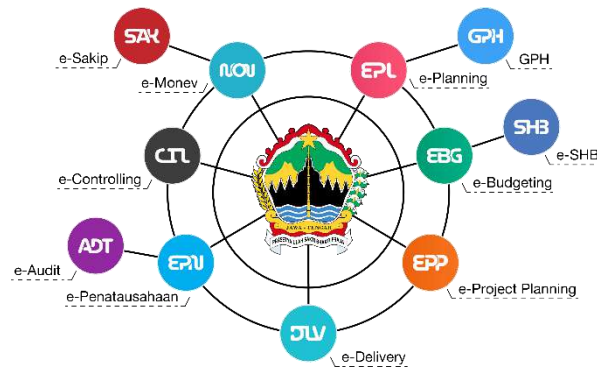
<b>NO</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Anggaran</b>
1.	Kepegawaian Daerah	a. Persentase pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya	100%	<b>Rp 16.197.584.000,-</b>
		b. Persentase PNS yang meningkat kualifikasinya melalui tugas belajar dan ijin belajar	100%	
		c. Persentase PNS yang terpetakan kompetensinya	100%	
		d. Persentase layanan administrasi kepegawaian	100%	
		e. Persentase penanganan kasus kepegawaian	100%	
		f. Persentase sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan	100%	
2.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	a. Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD	100%	<b>Rp 39.286.416.000,-</b>
		b. Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, Keuangan Perangkat Daerah	100%	

## **2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja**

Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah memanfaatkan aplikasi-aplikasi pendukung pelaksanaan kegiatan dan mengembangkan aplikasi guna mendukung, mempermudah dan mempercepat proses pelayanan kepegawaian, yaitu :

## 1. Government Resources Management System (GRMS);

Adalah bangunan system aplikasi terintegrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri atas *e-planning*, *e-budgetting*, *e-RKO*, *e-penatausahaan*, *e-controlling* yang membantu dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian tujuan BKD Provinsi Jawa Tengah.



## 2. SINAGA (Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian);

Adalah sebuah sistem informasi pelayanan kepegawaian digital yang juga tersedia dalam versi *mobile* yang dapat diakses pada perangkat *smartphone* dengan tujuan untuk percepatan layanan-layanan kepegawaian ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Fitur-fitur pada Sinaga akan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan layanan kepegawaian antara lain:

- a. Informasi Profil pegawai;
- b. Capaian Kinerja;
- c. Take Home Pay;
- d. Presensi/Kehadiran ASN;
- e. Layanan Cuti Pegawai (Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Melahirkan, Cuti Alasan Penting, dan CLTN);
- f. PKSP;
- g. E-File;
- h. Mutasi Online;
- i. Talent Scouting;
- j. Si-Detik;

- k. Si-Mapan;
- l. Jadwal CAT Pemetaan;
- m. Tugas Belajar dan Ijin Belajar;
- n. Website BKD dan lain-lain.



### **Aplikasi SINAGA**

## **2. Simpeg (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian);**

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 Simpeg adalah suatu totalitas yang terpadu terdiri atas perangkat pengolah meliputi pengumpul, prosedur, tenaga pengolah dan perangkat lunak: perangkat penyimpan meliputi pusat data dan bank data serta perangkat komunikasi yang saling berkaitan, berketergantungan dan saling berkaitan, berkesinambungan dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi di bidang kepegawaian. Selain itu, Simpeg bermanfaat sebagai sarana penyediaan informasi yang akurat untuk keperluan perencanaan, pengembangan, kesejahteraan dan pengendalian.



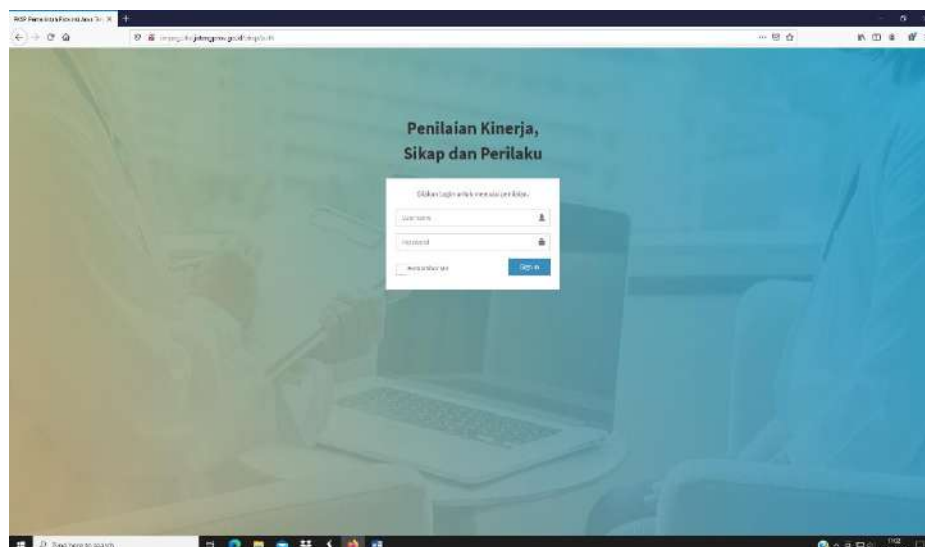


### Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg)

### 3. Penilaian Kinerja, Sikap dan Perilaku (PKSP);

Penilaian ini guna untuk mengetahui kinerja, sikap dan perilaku 360<sup>0</sup> Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan pegawai, perlu dilakukan penilaian kinerja sikap dan perilaku kerja secara *online*.

Penilaian ini dilakukan dengan pertimbangan pendapat dari atasan, rekan kerja setingkat dan bawahan langsung yang dilakukan melalui survei/penilaian secara tertutup dan berkala.



### Penilaian Kinerja, Sikap dan Perilaku (PKSP)

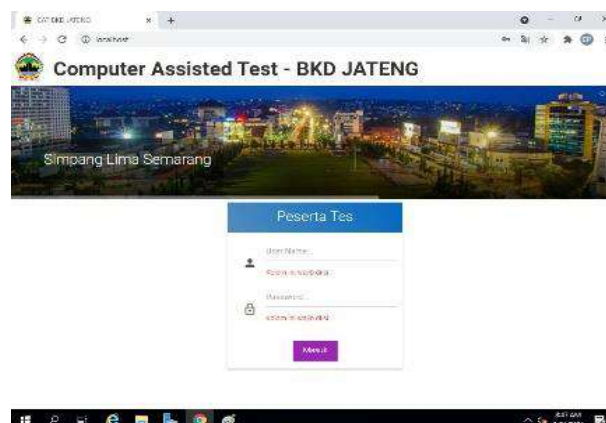
#### 4. Talent Scouting;

Merupakan sistem seleksi pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas secara terbuka dan kompetitif untuk mendapatkan *talent pool* yang memenuhi persyaratan kualifikasi, kompetensi dan kinerja.



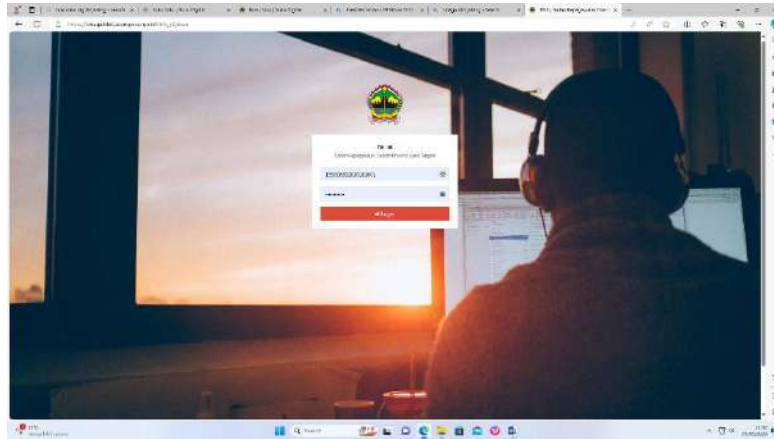
#### 5. CAT Potensi;

Sistem aplikasi komputer untuk mempercepat proses hasil penilaian individu untuk memperoleh gambaran umum dan menyeluruh mengenai potensi dan kompetensi yang dimiliki oleh seluruh individu dalam suatu organisasi, yang digunakan untuk Penyusunan Database Kompetensi ASN dan kuadran kompetensi ASN Competency Gap Analysis untuk Melihat Kesesuaian Antara Kompetensi yang Dimiliki ASN Dengan Jabatan yang didudukinya Pengembangan Karir ASN.



## 6. Sistem Peningkatan Kompetensi melalui Tugas Belajar dan Izin Belajar;

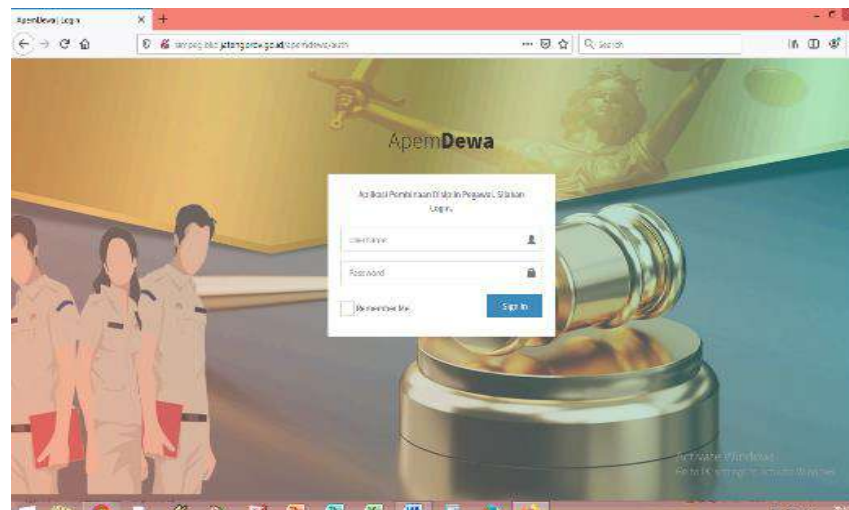
Merupakan system informasi yang digunakan untuk memberikan pelayanan tugas belajar dan izin belajar bagi PNS Provinsi Jawa Tengah.



Sistem aplikasi TB IB BKD Provinsi Jawa Tengah

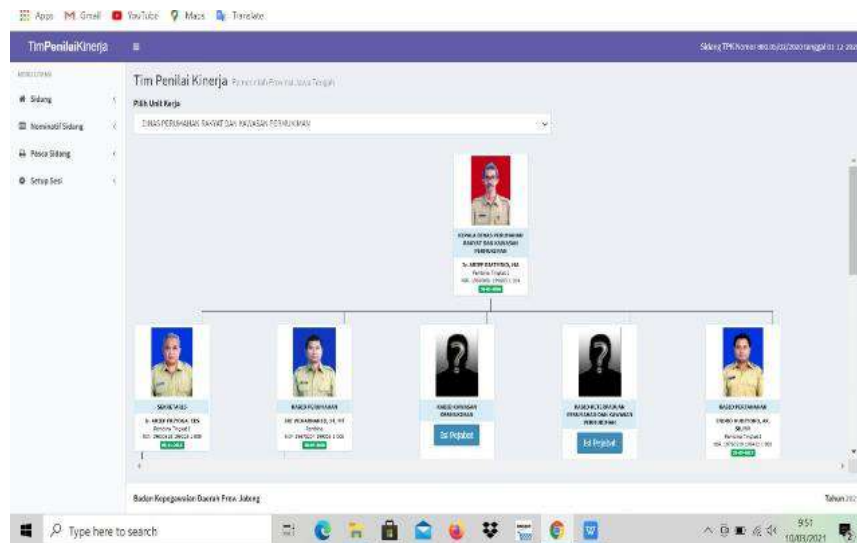
## 7. Sistem Pembinaan Disiplin PNS melalui Apem Dewa;

Merupakan aplikasi yang digunakan untuk mendukung penanganan kasus kepegawaian bagi PNS Provinsi Jawa Tengah yang terintegrasi dengan data base SIMPEG.



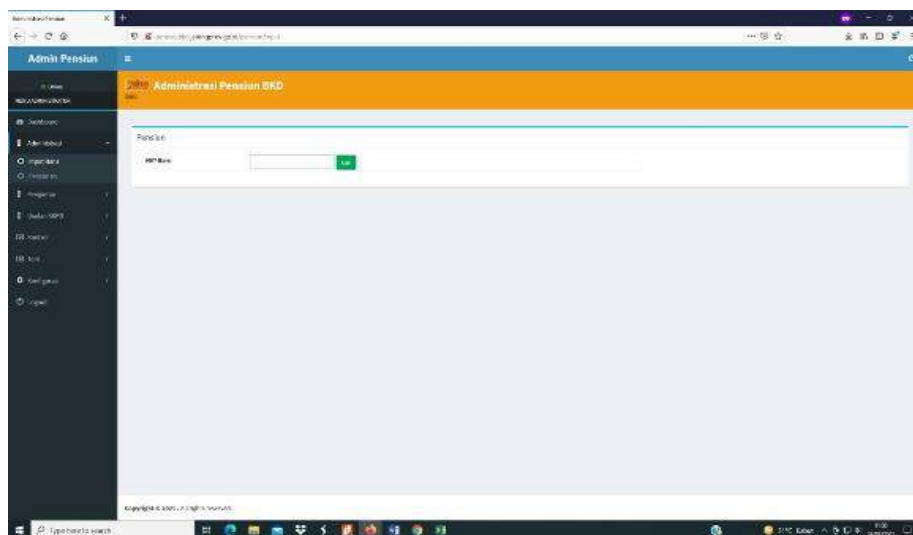
## 8. E-Tim Penilai Kinerja;

Merupakan aplikasi yang digunakan untuk mendukung system penataan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas.



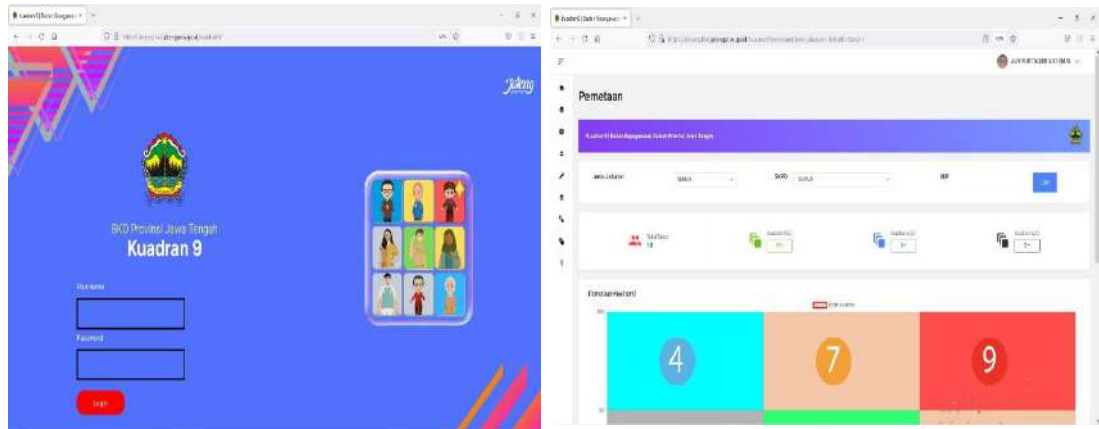
## 9. Sistem Pelayanan Pensiun Otomatis;

Merupakan aplikasi yang digunakan untuk memberikan layanan pensiun otomatis bagi PNS Provinsi Jawa Tengah.



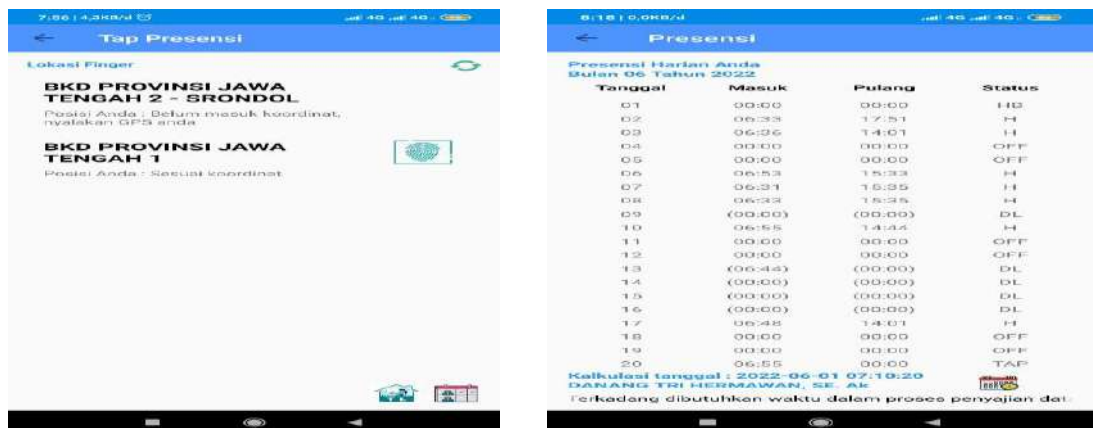
## 10. Aplikasi Kuadran IX;

Merupakan aplikasi yang berisi data base PNS dalam kuadran kompetensi dengan menggabungkan data kinerja dan kompetensi dalam kuadran, yang nantinya akan digunakan dalam proses penataan dalam sistem e-TPK.



## 11. Aplikasi e-Presensi

Merupakan aplikasi yang digunakan untuk melaksanakan presensi dengan menggunakan perangkat smartphone android berbasis geotagging.



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Skala Pengukuran Kinerja**  
**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

<b>NO</b>	<b>SKALA CAPAIAN KINERJA</b>	<b>KATEGORI</b>
a.	Sangat Baik	> 100%
b.	Baik	85 – 100%
c.	Cukup	65 – 84,99%
d.	Kurang	50 – 64,99%
e.	Sangat Kurang	< 50%

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BKD Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis BKD Provinsi Jawa Tengah beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

1. **Tabel 3.1.1** Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023:

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
A.	Terwujudnya Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen ASN	Nilai Sistem Merit	340	340,5	100,1	Sangat Baik	KASN
1.	Distribusi Penempatan PNS dalam Jabatan	Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan	100%	100%	100	Baik	BKD
2.	Pengembangan Layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi	Persentase Pengembangan Layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi	100%	100%	100	Baik	BKD
B.	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	89	89,25	100,3	Sangat Baik	BKD
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	89	89,25	100,3	Sangat Baik	BKD
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	81	80,55	99,4	Baik	(Inspektorat) BKD

Pada tabel di atas dapat diketahui pencapaian target dari 2 (dua) Tujuan BKD Provinsi Jawa Tengah dikategorikan dengan Sangat Baik. Sedangkan pada level Sasaran dapat dikategorikan Sangat Baik dan Baik. Terdapat nilai capaian Sasaran yang kurang memenuhi target yaitu 99,4% dikarenakan



adanya penambahan instrument dalam penilaian SAKIP Perangkat Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

Terwujudnya penyelenggaraan sistem merit dengan indikator tujuan Nilai sistem merit, target Tahun 2023 adalah 340 dan realisasinya 340,5 (100,1%) dengan kategori **SANGAT BAIK** jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu 337,5, mengalami kenaikan nilai sebesar 3 (tiga). Dapat dijelaskan secara rinci definisi operasionalnya yaitu :

- a. Sistem merit adalah Kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi.
- b. Indeks Sistem Merit adalah indek hasil penilaian implementasi sistem merit berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditetapkan KASN, yang merupakan kumulatif jumlah nilai yang dihasilkan dari semua kriteria penilaian sistem merit yang telah diimplementasikan dibagi total nilai kriteria penilaian sistem merit apabila diimplementasikan secara sempurna.
- c. Nilai Sistem Merit adalah angka komulatif hasil penilaian dari kriteria penilaian sistem merit yang meliputi : Perencanaan kebutuhan, Pengadaan, Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi, Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin, Perlindungan dan Pelayanan dan Sistem Pendukung, yang menunjukkan tingkat penerapan sistem merit di instansi. Perhitungan nilai sistem merit menggunakan sistem skor dan bobot pada masing-masing kriteria penilaian. Jumlah seluruh nilai yang ada merupakan capaian nilai sistem merit.

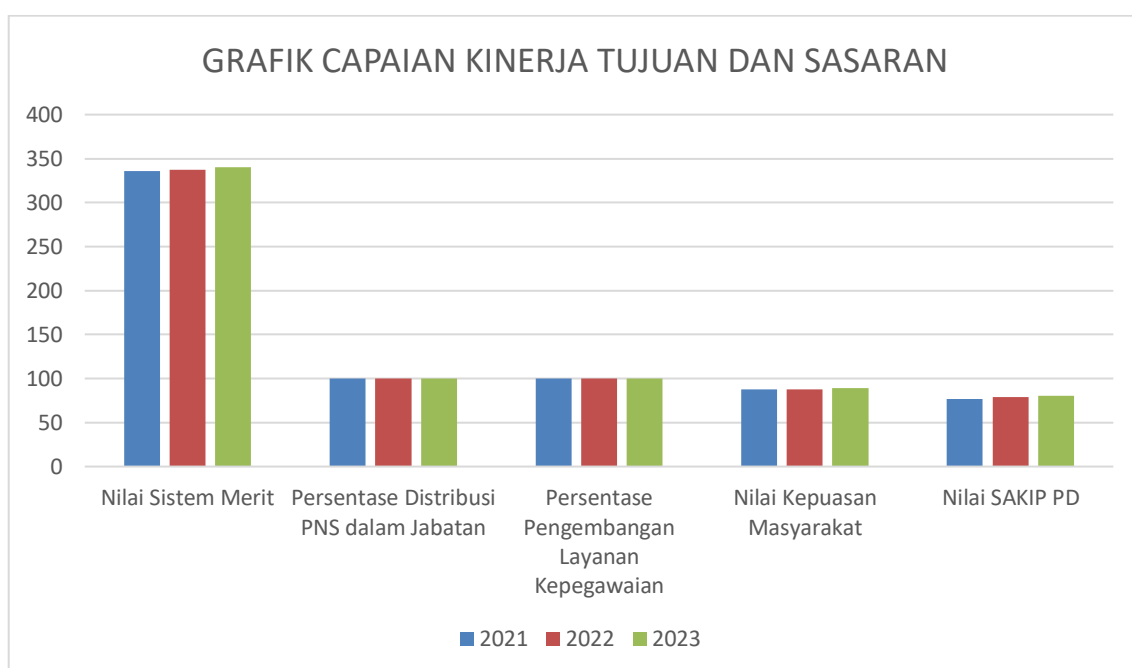
- d. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

2. **Tabel 3.1.2** Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (minimal 3 tahun):

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
A.	Terwujudnya Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen ASN	Nilai Sistem Merit	284	335,5	118	337	337,5	100,1	340	340,5	100,1
1.	Distribusi Penempatan PNS dalam Jabatan	Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100
2.	Pengembangan Layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi	Persentase Pengembangan Layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100
B.	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	87,5	88	100	88	88,5	100,5	89	89,25	100,3
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	87,5	88	100	88	88,5	100,5	89	89,25	100,3
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	74,71	76,47	102,3	77	79,17	102,8	81	80,55	99,4

Pada tabel diatas adalah perbandingan capaian pada 3 (tiga) tahun terakhir pada level tujuan dan sasaran atau Indikator Kinerja Utama BKD Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023. Jika dilihat dari realisasi dan capaiannya sudah sangat memenuhi target yang telah ditetapkan atau dengan kategori **Sangat Baik**. Hanya pada salah satu sasaran pada tahun 2023 tidak memenuhi target yaitu Nilai SAKIP PD (99,4%) dikarenakan adanya perubahan instrumen dalam penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat

**Gambar 7**  
**Grafik Capaian Kinerja 2021-2023**



Adapun hal-hal yang mendukung keberhasilan pada setiap indikator tujuan dan sasarannya adalah sebagai berikut :

- a. Nilai sistem merit dapat tercapai dikarenakan beberapa rekomendasi KASN dalam revidasi hasil penilaian tahun 2022 ditindaklanjuti dan disempurnakan prosesnya pada tahun 2023;

- b. Pada Indikator Persentase Distribusi PNS dalam Jabatan dan Persentase Pengembangan Layanan Kepegawaian yang cepat dan terintegrasi merupakan indikator dengan formulasi pengulangan, pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 sudah memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 100%;
- c. Nilai kepuasan masyarakat sudah memenuhi trend grafik meningkat pada setiap tahunnya. Pada indikator ini didukung pada penggunaan dan pemanfaatan aplikasi-aplikasi pendukung yang dimiliki BKD Provinsi Jawa Tengah dalam rangka memudahkan layanan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta pengisian kuisisioner oleh pengguna layanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- d. Nilai SAKIP Perangkat Daerah di setiap tahunnya selalu ada peningkatan, tetapi pada tahun 2023 kurang memenuhi target yang ditetapkan dikarenakan adanya perubahan instrument dalam penilaian dari Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Hasil penilaian ini merupakan hasil verifikasi dari Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang didukung dengan dokumen Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah yang sudah menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

3. **Tabel 3.1.3** Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (Renstra)

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target Akhir 2023	Capaian terhadap target 2023 %	Capaian terhadap target Renstra %
A.	Terwujudnya Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen ASN	Nilai Sistem Merit	340,5	284	119,89	119,89
1.	Distribusi Penempatan PNS dalam Jabatan	Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan	100%	100%	100	100
2.	Pengembangan Layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi	Persentase Pengembangan Layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi	100% (20 aplikasi)	100% (25 aplikasi)	100	100
B.	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	89,25	89	100,3	100,3
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	89,25	89	100,3	100,3
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	80,55	76	105	105,9

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada Tahun 2023, realisasi kinerja BKD Provinsi Jawa Tengah telah berhasil mencapai target tahunan bahkan melebihi target, kemudian dapat dijelaskan pula bahwa Tahun 2023 merupakan tahun ke-lima pelaksanaan Renstra BKD 2018-2023.

4. **Tabel 3.1.4** Membandingkan realisasi Kinerja Tahun ini dengan standar Nasional

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Standar Nasional	Capaian %
A.	Terwujudnya Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen ASN	Nilai Sistem Merit	340,5	410	83%

Standar Nilai Sistem Merit merupakan Standar Nasional yang sudah ditentukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan Nilai 410, yaitu nilai maksimal yang dapat diperoleh oleh Instansi Pemerintah dalam Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen ASN. Pada Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini BKD Provinsi Jawa Tengah telah mendapatkan nilai 340,5 atau 83% dari nilai maksimal yang ditetapkan dan memperoleh kategori Sangat Baik.

5. **Tabel 3.1.5** Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada Tahun 2023

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
A.	Terwujudnya Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen ASN	Nilai Sistem Merit	340	340,5	100,1	Nilai sistem merit dapat tercapai melebihi target yang telah ditetapkan dikarenakan adanya beberapa rekomendasi KASN dalam revidi hasil penilaian tahun 2022 ditindaklanjuti dan disempurnakan prosesnya pada tahun 2023	-
1.	Distribusi Penempatan PNS dalam Jabatan	Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan	100%	100%	100	Distribusi penempatan dalam jabatan dilakukan dengan skema talent scouting dan seleksi terbuka dengan prinsip Sistem Merit yaitu dengan	-

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
						kualifikasi, kompetensi dan kinerja tanpa membedakan unsur SARA	
2.	Pengembangan Layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi	Persentase Pengembangan Layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi	100%	100% (25 aplikasi)	100	Pengembangan layanan kepegawaian dapat tercapai karena konsistensi pembuatan dan atau pengembangan aplikasi sejumlah 5 (lima) aplikasi setiap tahun	-
B.	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	89	89,25	100,3	Nilai Kepuasan Masyarakat didukung pada penggunaan dan pemanfaatan aplikasi-aplikasi pendukung yang dimiliki BKD Provinsi Jawa Tengah dalam rangka memudahkan layanan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta pengisian kuisioner oleh pengguna layanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah	-
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	89	89,25	100,3	Nilai Kepuasan Masyarakat dapat melebihi target yang telah ditetapkan karena BKD Provinsi Jawa Tengah berupaya melakukan perbaikan-perbaikan dalam memberikan layanan kepegawaian.	-
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	81	80,55	99,4	Nilai Sakip PD kurang memenuhi target yang telah ditetapkan dikarenakan adanya perubahan instrumen dalam penilaian yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	BKD akan melengkapi eviden yang ditetapkan oleh Inspektorat Prov. Jateng pada evaluasi SAKIP mendatang.



6. **Tabel 3.1.6** Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Capaian %	
A.	Terwujudnya Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen ASN	Nilai Sistem Merit	340	340,5	100,1				
1.	Distribusi Penempatan PNS dalam Jabatan	Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan	100 %	100%	100	16.197.584.000	14.080.819.038	86,93	13,07%
2.	Pengembangan Layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi	Persentase Pengembangan Layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi	100 %	100%	100				
B.	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	89	89,25	100,3				
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	89	89,25	100,3	39.286.416.000	32.162.711.854	81,86	18,14%
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	81	80,55	99,4				

7. **Tabel 3.1.7** Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/Tidak Menunjang
A.	Terwujudnya Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen ASN	Nilai Sistem Merit	100,1				
1.	Distribusi Penempatan PNS dalam Jabatan	Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan	100	Kepegawaian Daerah	a. Persentase pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya	100	Menunjang
					b. Persentase PNS yang meningkat kualifikasinya melalui tugas belajar dan ijin belajar	100	Menunjang
					c. Persentase PNS yang terpetakan kompetensinya	100	Menunjang
2.	Pengembangan Layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi	Persentase Pengembangan Layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi	100	Kepegawaian Daerah	a. Persentase layanan administrasi kepegawaian	100	Menunjang
					b. Persentase penanganan kasus kepegawaian	100	Menunjang
					c. Persentase sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan	100	Menunjang
B.	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	100				
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	a. Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD	100	Menunjang
					b. Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, Keuangan Perangkat Daerah	99,4	Menunjang

Pencapaian Tujuan dan indikator tujuan tentunya juga didukung oleh 2 (dua) sasaran strategis yaitu:

a. Distribusi Penempatan PNS dalam Jabatan

Definisi operasionalnya adalah proses penempatan PNS dalam formasi jabatan memperhatikan kualifikasi dan kompetensi pegawai serta kebutuhan organisasi, untuk mewujudkan tujuan organisasi perangkat daerah.

Capaian sasaran strategis kesatu pada tabel 3.1.7 dapat ditunjukkan pada tahun 2023 target 100% dengan realisasinya adalah rata-rata 100% dan termasuk pada kategori **Baik**, jika dibandingkan dengan tahun 2022 realisasinya sama yaitu 100% dikarenakan merupakan indikator pengulangan. Indikator program (sesuai dengan RPJMD 2018-2023) yang mendukung pada sasaran strategis kesatu adalah :

- 1) Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya. Target indikator program ini pada tahun 2023 adalah 100% dengan realisasinya 100%, sama dengan tahun 2022 yaitu 100% dikarenakan merupakan indikator pengulangan. Kegiatan yang mendukung pada indikator program ini yaitu :
  - a) Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN dengan Sub Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN dan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional;
  - b) Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN dengan Sub Pengelolaan Promosi ASN;
  - c) Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.
- 2) Persentase PNS yang meningkat kualifikasinya melalui tugas belajar dan Ijin Belajar. Target indikator program ini pada tahun 2023 adalah 100% dengan realisasinya 100%. Indikator ini merupakan indikator dengan kategori atau

jenis progress positif, sehingga target setiap tahunnya merupakan peningkatan dari tahun lalu. Kegiatan yang mendukung pada indikator program ini yaitu :

- a) Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN dengan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN;
  - b) Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN dengan Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN.
- 3) Persentase PNS yang terpetakan kompetensinya (sesuai target yang ditetapkan 10.000 orang dalam 5 tahun). Target indikator program ini pada tahun 2023 adalah 100% dengan realisasinya 100%. Indikator ini merupakan indikator dengan kategori atau jenis progress positif, sehingga target setiap tahunnya merupakan peningkatan dari tahun lalu. Kegiatan yang mendukung pada indikator program ini yaitu :
- a) Pengembangan Kompetensi ASN dengan Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center.
  - b. Pengembangan layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi  
Definisi operasionalnya adalah upaya meningkatkan layanan kepada PNS yang membutuhkan dalam berbagai bentuk keperluan di bidang kepegawaian menuju pelayanan yang cepat dan terintegrasi dalam ruang lingkup manajemen ASN.

Capaian sasaran strategis kedua pada tabel 3.1.7 dapat ditunjukkan target 100% dengan realisasinya adalah 5 aplikasi (100%) dan termasuk pada kategori **Baik**. Indikator program yang mendukung pada sasaran strategis kedua adalah :

- 1) Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian. Target indikator ini adalah 100% dengan realisasi pada tahun 2023 adalah 100%. Kegiatan yang mendukung pada indikator ini antara lain:

- a) Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK, Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian;
  - b) Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN dengan Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN, dan Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN.
- 2) Persentase Penanganan Kasus Kepegawaian. Target indikator program ini adalah 100% dengan realisasi pada tahun 2023 yaitu 100%. Kegiatan yang mendukung indikator ini adalah :
- a) Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN;
  - b) Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN, Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN, Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai, Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai.
- 3) Persentase Sistem Informasi Kepegawaian yang dikembangkan dan terintegrasi. Indikator program ini dengan target 100% dan realisasinya pada tahun 2023 adalah 100%. Indikator ini merupakan indikator dengan kategori atau jenis progress positif, sehingga target setiap tahunnya merupakan peningkatan dari tahun lalu. Kegiatan yang mendukung pada indikator ini adalah :
- a) Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN dengan Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian, dan Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian.

### 3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2023

---

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2023, didukung dengan Anggaran sebesar **Rp. 47.519.256.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Realisasi Anggaran Tahun 2023**

<b>NO</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>% Capaian</b>
1.	Kepegawaian Daerah	16.197.584.000	14.080.819.038	86,93
2.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.286.416.000	32.162.711.854	81,86
<b>Rata-rata capaian</b>				<b>84,39</b>

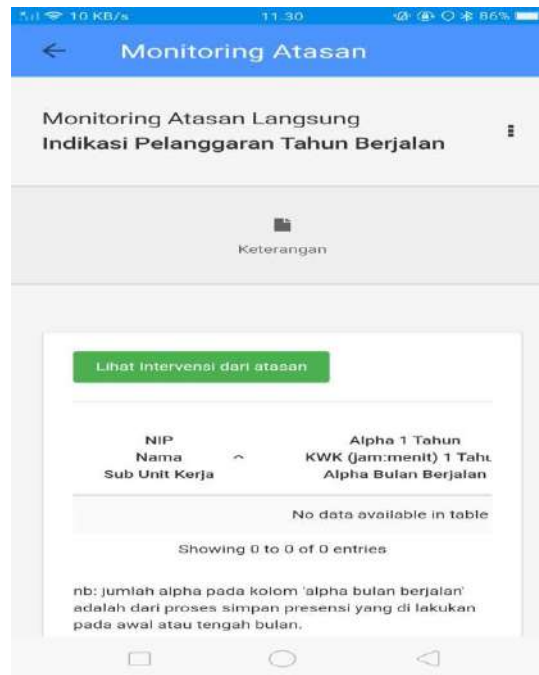
Realisasi anggaran pada tahun 2023 pada 2 (dua) program/kegiatan tersebut diatas hampir memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan. Dapat dikatakan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah **CUKUP**.

### 3.3 Inovasi

---

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja BKD Provinsi Jawa Tengah, BKD telah melaksanakan akselerasi-akselerasi dalam upaya melaksanakan pelayanan kepegawaian yang optimal. Pada Tahun 2023, BKD Provinsi Jawa Tengah membuat inovasi/terobosan yaitu dengan mengembangkan aplikasi e-presensi yang disempurnakan dengan menambahkan fitur notifikasi dalam rangka memonitoring tingkat kepatuhan akan jam kerja bawahan yang dapat diakses oleh para atasan langsung yang lebih mudah dikenal dengan nama *sinias*. Inovasi yang telah dilakukan ini mendukung pencapaian kinerja BKD Provinsi Jawa Tengah khususnya pada Sasaran Pengembangan layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi.

Gambar 8  
SINIAS (Sistem Notifikasi dan Intervensi Absensi ASN)






### 3.4 Penghargaan

Sebagai wujud kinerja BKD Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mendukung pembangunan daerah di bidang kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2023 telah mendapatkan penghargaan-penghargaan bidang kepegawaian dalam cakupan nasional antara lain sebagai berikut :



**Tabel 3.4**  
**Penghargaan BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023**

No	Penghargaan	Bukti Dukung	Keterangan
1.	Kategori Utama Implementasi NSPK Manajemen ASN Terbaik BKN Award Tahun 2023.		Mendukung pada sasaran : Distribusi Penempatan PNS dalam Jabatan
2.	Kategori Elemen Implementasi Manajemen ASN dan Pemanfaatan Sistem Informasi Aspek Pengembangan Kompetensi BKN Award Tahun 2023.		Mendukung pada sasaran : Distribusi Penempatan PNS dalam Jabatan
3.	Special Mention Peningkatan Pelayanan Kepegawaian BKN Award Tahun 2023.		Mendukung pada Sasaran : Pengembangan Layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi

No	Penghargaan	Bukti Dukung	Keterangan
4.	Penghargaan Anugerah Meritokrasi KASN 2023 atas keberhasilan dalam melaksanakan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi melalui Manajemen Talenta.		Mendukung pada sasaran : Distribusi Penempatan PNS dalam Jabatan

### 4.1 Kesimpulan

---

Penyelenggaraan kegiatan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) BKD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan.

Dengan adanya dinamika kebijakan yang sangat dinamis dalam pengelolaan SDM Aparatur dan juga tuntutan masyarakat akan pelayanan yang semakin cepat dan terintegrasi, maka BKD Provinsi Jawa Tengah terus berupaya melakukan penyesuaian kebijakan, perbaikan tata Kelola dan juga transformasi digital dengan penguatan infrastruktur, jaringan, dan sekuritas menuju digitalisasi Layanan kepegawaian yang terintegrasi.

Dengan memperhatikan uraian dan data pada bab III, maka dapat disampaikan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dinyatakan berhasil, karena hampir semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori **Sangat Baik** dengan rata-rata capaian 100,65%. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut:

1. Capaian kinerja Tujuan 1: Terwujudnya Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen ASN, tercapai 100,1 % atau dengan kategori **Sangat Baik**;
2. Capaian kinerja Sasaran 1 : Distribusi Penempatan PNS dalam Jabatan, tercapai sebesar 100% atau dengan kategori **Baik**;
3. Capaian kinerja Sasaran 2 : Pengembangan Layanan Kepegawaian yang cepat dan terintegrasi, tercapai sebesar 100% atau dengan kategori **Baik**;
4. Capaian kinerja Tujuan 2: Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah, tercapai 100,3% atau dengan kategori **Sangat Baik**;

5. Capaian kinerja Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah, tercapai sebesar 100,3% atau dengan kategori **Sangat Baik**;
6. Capaian kinerja Sasaran 2: Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah, tercapai 99,4% atau dengan kategori **Baik**.

BKD Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2023 mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp. 47.519.256.000,-** dan dapat direalisasikan sebesar **Rp. 46.243.530.892,-** atau **97,3%** dari total alokasi anggaran yang telah ditetapkan.

## **4.2 Rekomendasi**

---

Berdasarkan capaian kinerja BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, terdapat beberapa rencana strategis yang dirancang untuk mencapai target kinerja pada tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

- a. Peningkatan tata kelola Manajemen ASN berbasis *Human Capital Development Plan (HCDP)*;
- b. Perbaikan pengelolaan Manajemen Talenta melalui penyediaan Profil ASN berbasis kompetensi;
- c. Perbaikan tata kelola Sistem Informasi dengan *single base data* kepegawaian.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**



**RAHMAH NUR HAYATI, S.K.M, M.Kes**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19680520 199203 2 005**



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Stadion Selatan No. 1 Telp. (024) 8319421, 845813, 8318846  
Fax. (024) 8318890, 8415548 SEMARANG 50136  
Email : bkd@jatengprov.go.id – Website : <http://bkd.jatengprov.go.id>

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. WISNU ZAROH, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP

Jabatan : Gubernur Jawa Tengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
GUBERNUR JAWA TENGAH



Ditandatangani secara elektronik oleh:

H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP

Semarang, 31 Januari 2023  
Pihak Pertama,  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Drs. WISNU ZAROH, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19630526 199503 1 002

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

### BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

<b>NO.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Tujuan</b>			
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen ASN	Nilai Sistem Merit	340
<b>Sasaran</b>			
1.1	Distribusi Penempatan PNS dalam Jabatan	Persentase distribusi penempatan PNS dalam Jabatan	100%
1.2	Pengembangan Layanan Kepegawaian Yang Cepat dan Terintegrasi	Persentase Pengembangan layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi	100%

<b>NO.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Tujuan</b>			
2.	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	89
<b>Sasaran</b>			
2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	89
2.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	81



Program	Anggaran	Keterangan
1. Kepegawaian Daerah	Rp 17.408.815.000,-	APBD
2. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 66.662.615.000,-	APBD

Semarang, 31 Januari 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH



Ditandatangani secara elektronik oleh:

H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Drs. WISNU ZAROH, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19630526 199503 1 002



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jl. Stadion Selatan No. 1 Telp. (024) 8319421, 845813, 8318846  
Fax. (024) 8318890, 8415548 SEMARANG 50136  
Email : bkd@jatengprov.go.id – Website : http://bkd.jatengprov.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. LEGIMAN, M.Si

Jabatan : Sekretaris BKD Provinsi Jawa Tengah

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. WISNU ZAROH, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi Jawa Tengah

Drs. WISNU ZAROH, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19630526 199503 1 002

Pihak Pertama,  
Sekretaris  
BKD Provinsi Jawa Tengah

Drs. LEGIMAN, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650419 199710 1 001


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BKD PROVINSI JAWA TENGAH**

**Unit Kerja : Sekretariat**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya layanan umum, kepegawaian dan keuangan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100%
2	Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp66,562,615,000	APBD

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH



**Drs. WISNU ZAROH, M.Si**  
NIP. 19630526 199503 1 002

Semarang, 2023  
SEKRETARIS



**Drs. LEGIMAN, M.Si**  
NIP. 19650419 199710 1 001



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jl. Stadion Selatan No. 1 Telp. (024) 8319421, 845813, 8318846  
Fax. (024) 8318890, 8415548 SEMARANG 50136  
Email : bkd@jatengprov.go.id – Website : http://bkd.jatengprov.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDRO ARIS PUJIYANTO, S.STP, M.Si

Jabatan : Kepala Sub Bagian Program

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. LEGIMAN, M.Si

Jabatan : Sekretaris BKD Provinsi Jawa Tengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Sekretaris  
BKD Provinsi Jawa Tengah

Drs. LEGIMAN, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650419 199710 1 001

Semarang, 2023  
Pihak Pertama,  
Kepala Sub Bagian Program

INDRO ARIS PUJIYANTO, S.STP, M.Si  
Penata  
NIP. 19900830 201010 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BKD PROVINSI JAWA TENGAH**

**Unit Kerja : Sub Bagian Program**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN SUB KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	6 dokumen
	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	3 dokumen
	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen

<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp291,040,000	APBD
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp208,960,000	APBD

Semarang, 2023  
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM

SEKRETARIS



**Drs. LEGIMAN, M.Si**  
NIP. 19650419 199710 1 001



**INDRO ARIS PUJIYANTO, S.STP,M.Si**  
NIP. 19900830 201010 1 001



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jl. Stadion Selatan No. 1 Telp. (024) 8319421, 845813, 8318846  
Fax. (024) 8318890, 8415548 SEMARANG 50136  
Email : bkd@jatengprov.go.id – Website : <http://bkd.jatengprov.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARIF PRASETYO NUGROHO, SE,AK, M.Si

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. LEGIMAN, M.Si

Jabatan : Sekretaris BKD Provinsi Jawa Tengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Sekretaris  
BKD Provinsi Jawa Tengah

Drs. LEGIMAN, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650419 199710 1 001

Semarang, Februari 2023  
Pihak Pertama,  
Kepala Sub Bagian Keuangan

ARIF PRASETYO NUGROHO, SE,AK, M.Si  
Penata Tingkat I  
NIP. 19840514 201001 1 024

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BKD PROVINSI JAWA TENGAH**

**Unit Kerja : Sub Bagian Keuangan**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN SUB KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17 dokumen
	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan
	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	12 bulan
	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan keuangan PD (jenis)	12 bulan

<b>Sub Kegiatan</b>		<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	57,212,295,000	APBD
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp	1,471,650,000	APBD
3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp	60,000,000	APBD

**SEKRETARIS**



**Drs. LEGIMAN, M.Si**  
NIP. 19650419 199710 1 001

Semarang, Februari 2023  
**KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN**



**ARIF PRASETYO NUGROHO, SE,AK, M.Si**  
NIP. 19840514 201001 1 024





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jl. Stadion Selatan No. 1 Telp. (024) 8319421, 845813, 8318846  
Fax. (024) 8318890, 8415548 SEMARANG 50136  
Email : bkd@jatengprov.go.id – Website : <http://bkd.jatengprov.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DANANG TRI HERMAWAN, SE. Ak

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. LEGIMAN, M.Si

Jabatan : Sekretaris BKD Provinsi Jawa Tengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Sekretaris  
BKD Provinsi Jawa Tengah

Drs. LEGIMAN, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650419 199710 1 001

Semarang, 2023  
Pihak Pertama,  
Kepala Sub Bagian Umum dan  
Kepegawaian

DANANG TRI HERMAWAN, SE. Ak  
Penata Tingkat I  
NIP. 19800417 200312 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BKD PROVINSI JAWA TENGAH**

Unit Kerja : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1.</b>	<b>Tersusunnya laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>1 dokumen</b>
	Terlaksananya pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	12 Bulan
<b>2.</b>	<b>Tersusunnya laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>1 dokumen</b>
	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/ Seminar	30 Orang
<b>3.</b>	<b>Tersusunnya laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah</b>	<b>1 dokumen</b>
	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan
	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	12 Unit
	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	12 Bulan
	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	12 Bulan
	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	12 Bulan
	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	12 Bulan
	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	12 Bulan
	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 Bulan

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Terlaksananya dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Jumlah laporan pelaksanaan SPBE	1 Laporan
<b>4.</b>	<b>Tersusunnya laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1 dokumen</b>
	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional	2 Unit
	Tersedianya mebel	Jumlah unit pengadaan meubelair	3 Unit
	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	6 Unit
<b>5.</b>	<b>Tersusunnya laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1 dokumen</b>
	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	12 Bulan
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	12 Bulan
	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan
<b>6.</b>	<b>Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1 dokumen</b>
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	12 Bulan
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	2 Unit
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	12 Bulan

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp160.000.000	APBD
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp300.000.000	APBD
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp30.000.000	APBD
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp527.280.000	APBD
5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp40.000.000	APBD
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp250.000.000	APBD
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp300.000.000	APBD
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp18.000.000	APBD
9	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp350.000.000	APBD
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp800.000.000	APBD
11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp300.000.000	APBD
12	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp500.000.000	APBD
13	Pengadaan Mebel	Rp30.000.000	APBD
14	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp250.000.000	APBD
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp60.000.000	APBD
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp750.000.000	APBD
17	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp140.000.000	APBD

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp350.000.000	APBD
20	Pemeliharaan Mebel	Rp20.000.000	APBD
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp886.100.000	APBD
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp357.290.000	APBD

SEKRETARIS

**Drs. LEGIMAN, M.Si**  
**NIP. 19650419 199710 1 001**

Semarang, 2023  
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

  
**DANANG TRI HERMAWAN, SE. AK**  
**NIP. 19800417 200312 1 002**





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jl. Stadion Selatan No. 1 Telp. (024) 8319421, 845813, 8318846  
Fax. (024) 8318890, 8415548 SEMARANG 50136  
Email : bkd@jatengprov.go.id – Website : <http://bkd.jatengprov.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARY WIDIYANTORO, S.STP, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. WISNU ZAROH, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi Jawa Tengah

Drs. WISNU ZAROH, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19630526 199503 1 002

Pihak Pertama,  
Kepala Bidang Perencanaan dan  
Pengembangan Pegawai

ARY WIDIYANTORO, S.STP, M.Si  
Pembina  
NIP.19800305 199912 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BKD PROVINSI JAWA TENGAH**

**Unit Kerja : Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Distribusi Penempatan PNS dalam Jabatan	1. Presentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas dan Pejabat Fungsional yang terevaluasi kinerjanya	100%
		2. Presentase PNS meningkat kualifikasinya melalui tugas belajar dan izin belajar	100%

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1. Program Kepegawaian Daerah	Rp5.869.900.000	APBD

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH



**Drs. WISNU ZAROH, M.Si**  
NIP. 19630526 199503 1 002

Semarang, 2023  
KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI



**ARY WIDIYANTORO, S.STP, M.Si**  
NIP. 19800305 199912 1 001





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jl. Stadion Selatan No. 1 Telp. (024) 8319421, 845813, 8318846  
Fax. (024) 8318890, 8415548 SEMARANG 50136  
Email : bkd@jatengprov.go.id – Website : <http://bkd.jatengprov.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HILMAN SAHRIZAL, S.STP, M.Si  
Jabatan : Sub Koordinator Pengembangan Pegawai  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ARY WIDIYANTORO, S.STP, M.Si  
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Perencanaan dan  
Pengembangan Pegawai

ARY WIDIYANTORO, S.STP, M.Si  
Pembina  
NIP. 19800305 199912 1 001

Semarang, 2023  
Pihak Pertama,  
Sub Koordinator Pengembangan Pegawai

HILMAN SAHRIZAL, S.STP, M.Si  
Penata  
NIP. 19900323 201010 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BKD PROVINSI JAWA TENGAH**

Unit Kerja : Sub Koordinator Pengembangan Pegawai

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselesainya usulan fomasi ASN	Persentase usulan formasi ASN	100%
	Terselesainya dokumen pengembangan manajemen talenta	Jumlah dokumen pengembangan manajemen talenta	1 dokumen
2.	Terpenuhinya PNS yang menempuh pendidikan lanjutan dari hasil verifikasi	Persentase PNS yang menempuh pendidikan lanjutan dari hasil verifikasi	100%
	Terpenuhinya ASN yang mengikuti Diklat Lemhanas	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Lemhanas	1 orang
	Terpenuhinya ASN yang mengikuti diklat Pim Tk I	Jumlah ASN yang mengikuti diklat Pim Tk I	1 orang
	Terselenggaranya Ujian Dinas bagi PNS Pemprov dan Kab/Kota	Jumlah PNS Pem Prov dan Kab/ Kota yang mengikuti ujian dinas	851 orang
	Terselenggaranya Ujian UKPPI bagi PNS Pemprov dan Kab/Kota	Jumlah PNS Pem Prov dan Kab/ Kota yang mengikuti ujian UKPPI	500 orang
	Terpenuhinya PNS Pemprov yang menempuh pendidikan melalui ijin belajar	Jumlah PNS Pemprov yang menempuh pendidikan melalui ijin belajar	50 orang
	Terpenuhinya PNS Pemprov yang menempuh pendidikan tugas belajar	Jumlah PNS Pemprov yang menempuh pendidikan tugas belajar	13 orang

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penyusunan Dokumen pengembangan manajemen talenta	Rp47.390.000	APBD
2. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Rp3.451.660.000	APBD

KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN  
PENGEMBANGAN PEGAWAI



**ARY WIDIANTORO, S.STP, M.SI**  
NIP. 19800305 199912 1 001

Semarang, 2023  
SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN PEGAWAI



**HILMAN SAHRIZAL, S.STP, M.SI**  
NIP. 19900323 201010 1 002





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jl. Stadion Selatan No. 1 Telp. (024) 8319421, 845813, 8318846  
Fax. (024) 8318890, 8415548 SEMARANG 50136  
Email : bkd@jatengprov.go.id – Website : <http://bkd.jatengprov.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALIY MUTTAQIEN, S.STP, M.Si

Jabatan : Sub Koordinator Pengembangan Jabatan Fungsional  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ARY WIDIYANTORO, S.STP, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Perencanaan dan  
Pengembangan Pegawai

ARY WIDIYANTORO, S.STP, M.Si  
Pembina  
NIP.19800305 199912 1 001

Semarang, 2023  
Pihak Pertama,  
Sub Koordinator Pengembangan Jabatan  
Fungsional

ALIY MUTTAQIEN, S.STP, M.Si  
Penata  
NIP.19900414 201010 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BKD PROVINSI JAWA TENGAH**

**Unit Kerja : Sub Koordinator Pengembangan Jabatan Fungsional**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN SUB KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya PNS yang dilantik dalam Jabatan Fungsional	Persentase PNS yang dilantik dalam Jabatan Fungsional	100%
	Terpenuhinya Pejabat Fungsional yang dimonitoring dan evaluasi	Jumlah Pejabat Fungsional yang dimonitoring dan evaluasi	2000 orang
	Terpenuhinya PAK yang ditetapkan	Jumlah PAK yang ditetapkan	500 lembar
	Terpenuhinya PNS yang dilantik dalam jabatan fungsional	Jumlah PNS yang dilantik dalam jabatan fungsional	250 orang
	Tersedianya SK yang ditetapkan dalam Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah SK yang ditetapkan dalam Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan	1850 sertifikat

<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1. Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Rp70.000.000	APBD
2. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Rp470.916.000	APBD

KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN  
PENGEMBANGAN PEGAWAI



**ARY WIDIANTORO, S.STP, M.Si**  
NIP. 19800305 199912 1 001

Semarang, 2023  
SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN  
JABATAN FUNGSIONAL



**ALIY MUTTAQIEN, S.STP, M.Si**  
NIP. 19900414 201010 1 001





# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

## BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Stadion Selatan No. 1 Telp. (024) 8319421, 845813, 8318846  
Fax. (024) 8318890, 8415548 SEMARANG 50136  
Email : bkd@jatengprov.go.id – Website : <http://bkd.jatengprov.go.id>

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALIY MUTTAQIEN, S.STP, M.Si

Jabatan : Sub Koordinator Promosi dan Manajemen Kinerja  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ARY WIDIYANTORO, S.STP, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Perencanaan dan  
Pengembangan Pegawai

ARY WIDIYANTORO, S.STP, M.Si

Pembina

NIP.19800305 199912 1 001

Semarang, 2023

Pihak Pertama,  
Sub Koordinator Promosi dan  
Manajemen Kinerja

ALIY MUTTAQIEN, S.STP, M.Si

Penata

NIP. 19900414 201010 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BKD PROVINSI JAWA TENGAH**

**Unit Kerja : Sub Koordinator Promosi dan Manajemen Kinerja**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN SUB KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1.</b>	<b>Tersedianya pejabat struktural yang dilantik</b>	<b>Persentase pejabat struktural yang dilantik dari target yang diusulkan</b>	<b>100%</b>
	Tersedianya Calon Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Hasil Seleksi Promosi Terbuka	Jumlah Calon Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Hasil Seleksi Promosi Terbuka	1 orang
	Terpenuhinya PPT, Pejabat Administrator dan Pengawas yang terpilih (dilantik)	Jumlah PPT, Pejabat Administrator dan Pengawas yang terpilih (dilantik) memenuhi syarat Kompetensi, Kualifikas, rekam jejak jabatani dan Persyaratan Objektif lainnya	160 orang
<b>2.</b>	<b>Tersedianya ASN yang dinilai PKSP</b>	<b>Persentase ASN yang dinilai PKSP</b>	<b>100%</b>
	Terpenuhinya Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang terevaluasi dan terdatabase kinerjanya	Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang terevaluasi dan terdatabase kinerjanya di lingkungan Pemprov Jateng	940 orang
	Tersedianya PNS yang masuk Talent Pool	Jumlah PNS yang masuk Talent Pool	200 orang
	Tersedianya PNS yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti uji kompetensi calon pejabat administrator dan pengawas	Jumlah PNS yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti uji kompetensi calon pejabat administrator dan pengawas	600 orang

<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1. Pengelolaan Promosi ASN	Rp941.654.000	APBD
2. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp606.200.000	APBD

KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN  
PENGEMBANGAN PEGAWAI



**ARY WIDIYANTORO, S.STP, M.Si**  
NIP. 19800305 199912 1 001

Semarang, 2023  
SUB KOORDINATOR PROMOSI DAN  
MANAJEMEN KINERJA



**ALIY MUTTAQIEN, S.STP, M.Si**  
NIP. 19900414 201010 1 001





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jl. Stadion Selatan No. 1 Telp. (024) 8319421, 845813, 8318846  
Fax. (024) 8318890, 8415548 SEMARANG 50136  
Email : bkd@jatengprov.go.id – Website : http://bkd.jatengprov.go.id

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RADEN RARA UTAMI RAHAJENG, S.H., M.M.

Jabatan : Kepala Bidang Mutasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. WISNU ZAROH, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi Jawa Tengah

Drs. WISNU ZAROH, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19630526 199503 1 002

Pihak Pertama,  
Kepala Bidang Mutasi

R.R. UTAMI RAHAJENG, S.H., M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700113 198903 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BKD PROVINSI JAWA TENGAH**

**Unit Kerja : Bidang Mutasi**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian	Presentase layanan administrasi kepegawaian	100%

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1. Program Kepegawaian Daerah	Rp7.318.576.000	APBD

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH



**Drs. WISNU ZAROH, M.Si**  
NIP. 19630526 199503 1 002

Semarang,  
KEPALA BIDANG MUTASI

2023



**RADEN RARA UTAMI RAHAJENG, SH, MM**  
NIP. 19700113 198903 2 002





# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Stadion Selatan No. 1 Telp. (024) 8319421, 845813, 8318846  
Fax. (024) 8318890, 8415548 SEMARANG 50136  
Email : bkd@jatengprov.go.id – Website : <http://bkd.jatengprov.go.id>

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEYAS YANI RAHMAWAN, S.STP, M.M

Jabatan : Sub Koordinator Kenaikan Pangkat dan Layanan Administrasi Kepegawaian

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RADEN RARA UTAMI RAHAJENG, S.H., M.M.

Jabatan : Kepala Bidang Mutasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Mutasi

R.R. UTAMI RAHAJENG, S.H., M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700113 198903 2 002

Semarang, 2023

Pihak Pertama,  
Sub Koordinator Kenaikan Pangkat dan  
Layanan Administrasi Kepegawaian

DEYAS YANI RAHMAWAN, S.STP, M.M  
Pembina  
NIP. 19830525 200212 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BKD PROVINSI JAWA TENGAH**

**Unit Kerja : Sub Koordinator Kenaikan Pangkat dan Layanan Administrasi Kepegawaian**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN SUB KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<b>Terselesaikannya layanan Kenaikan Pangkat tepat waktu</b>	<b>Persentase layanan Kenaikan Pangkat tepat waktu</b>	<b>100%</b>
	Terlaksananya fasilitasi Izin Cuti	Jumlah fasilitasi Izin Cuti	400 orang
	Terselesaikannya usul Karis/Karsu	Jumlah pembuatan Karis/Karsu	400 orang
	Terlaksananya pembuatan Kartu Pegawai	Jumlah pembuatan Karpeg	300 orang
	Terlaksananya penerbitan SPTKG	Jumlah penerbitan SPTKG	20 orang
	Terselesaikannya SK Kenaikan Pangkat PNS Pemprov dan Kab/Kota	Jumlah penyelesaian SK Kenaikan Pangkat PNS tepat waktu Pemprov dan Kab/Kota	10.000 sertifikat
	Terlaksananya sumpah janji PNS	Jumlah PNS yang melaksanakan sumpah janji	750 orang

<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Rp498.930.000	APBD

KEPALA BIDANG MUTASI



**RADEN RARA UTAMI RAHAJENG, S.H., M.M.**  
NIP. 19700113 198903 2 002

Semarang, 2023  
SUB KOORDINATOR KENAIKAN PANGKAT  
DAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN



**DEYAS YANI RAHMAWAN, S.STP, MM**  
NIP. 19830525 200212 1 001





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jl. Stadion Selatan No. 1 Telp. (024) 8319421, 845813, 8318846  
Fax. (024) 8318890, 8415548 SEMARANG 50136  
Email : bkd@jatengprov.go.id – Website : <http://bkd.jatengprov.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : OKY JUNED CAHYONUGROHO, S.STP, M.Si

Jabatan : Sub Koordinator Formasi dan Pengangkatan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RADEN RARA UTAMI RAHAJENG, S.H., M.M.

Jabatan : Kepala Bidang Mutasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Mutasi

R.R. UTAMI RAHAJENG, S.H., M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700113 198903 2 002

Semarang, 6 Februari 2023  
Pihak Pertama,  
Sub Koordinator Formasi dan Pengangkatan

OKY JUNED CAHYONUGROHO, S.STP, M.Si  
Penata Tingkat I  
NIP. 19831123 200312 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BKD PROVINSI JAWA TENGAH**

**Unit Kerja : Sub Koordinator Formasi dan Pengangkatan**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN SUB KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselesaikannya layanan pengadaan CASN	Persentase CASN yang lulus seleksi pengadaan ASN	90%
	Terselenggaranya fasilitasi seleksi Capra IPDN	Jumlah fasilitasi seleksi capra IPDN asal pendaftaran Provinsi Jawa Tengah	3000 orang
	Terselenggaranya pembekalan purna praja IPDN	Jumlah pembekalan purna Praja IPDN asal pendaftaran Provinsi Jawa Tengah	135 orang
	Terselesaikannya SK CPNSD dan SK PNSD	Jumlah Penyelesaian SK CPNSD dan SK PNSD	150 orang
	Terselesaikannya dokumen Daftar Susunan Pegawai selama 5 tahun dan penetapan kebutuhan pegawai sesuai formasi dan kelas jabatan	Terselesaikannya Penyusunan Dokumen Daftar Pegawai 5 Tahun dan Penetapan Kebutuhan Pegawai Sesuai Formasi dan Kelas Jabatan	1 Dokumen
	Terselenggaranya Seleksi Pengadaan ASN Pemprov Jawa Tengah dan fasilitasi pengadaan CPNSD Kab/Kota	Jumlah Seleksi Pengadaan ASN Pemprov Jawa Tengah dan fasilitasi pengadaan CPNSD Kab/Kota	1 kegiatan

<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Rp6.242.846.000	APBD

**KEPALA BIDANG MUTASI**

  
**RADEN RARA UTAMI RAHAJENG, S.H., M.M.**  
NIP. 19700113 198903 2 002

Semarang, 6 Februari 2023  
SUB KOORDINATOR FORMASI DAN  
PENGANGKATAN

  
**OKY JUNED CAHYONUGROHO, S.STP, M.Si**  
NIP. 19831123 200312 1 001





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jl. Stadion Selatan No. 1 Telp. (024) 8319421, 845813, 8318846  
Fax. (024) 8318890, 8415548 SEMARANG 50136  
Email : bkd@jatengprov.go.id – Website : <http://bkd.jatengprov.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHARYO INDRO YULIANTO, S.Kom, M.Ak  
Jabatan : Sub Koordinator Pemindahan dan Pemberhentian  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RADEN RARA UTAMI RAHAJENG, S.H., M.M.  
Jabatan : Kepala Bidang Mutasi  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Mutasi

R.R. UTAMI RAHAJENG, S.H., M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700113 198903 2 002

Semarang, 2023  
Pihak Pertama,  
Sub Koordinator Pemindahan dan  
Pemberhentian

MUHARYO INDRO YULIANTO, S.Kom, M.Ak  
Pembina  
NIP. 19790710 200501 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BKD PROVINSI JAWA TENGAH**

**Unit Kerja : Sub Koordinator Pemindahan dan Pemberhentian**

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1.</b>	<b>Terselesaikannya layanan pensiun tepat waktu</b>	<b>Persentase layanan pensiun tepat waktu</b>	<b>100%</b>
	Terselesaikannya layanan administrasi pensiun	Jumlah pelayanan administrasi pensiun	2200 sertifikat
	Tertindakannya kegiatan pemberkasan dan validasi usulan penetapan pensiun otomatis (PPO) PNS	Jumlah pemberkasan dan validasi usulan penetapan pensiun otomatis (PPO) PNS	4 kegiatan
<b>2.</b>	<b>Tertindakannya mutasi PNS ke Pemprov Jateng</b>	<b>Persentase pegawai yang diterima dari ajuan mutasi luar Pemprov Jateng</b>	<b>75%</b>
	Terselesaikannya OPD yang dievaluasi penempatan Pejabat Pelaksana sesuai Peta Jabatan	Jumlah OPD yang dievaluasi penempatan Pejabat Pelaksana sesuai Peta Jabatan	49 OPD
	Tertindakannya layanan administrasi mutasi PNS	Jumlah pelayanan administrasi mutasi PNS	200 orang
	Tersedianya rekomendasi hasil evaluasi penempatan pejabat pelaksana sesuai peta jabatan di OPD	Rekomendasi hasil evaluasi penempatan pejabat pelaksana sesuai peta jabatan di OPD	0 OPD
	Terselenggaranya Tes Mutasi PNS	Test Mutasi PNS	100 orang

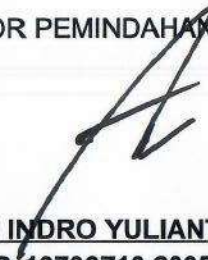
Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Rp400.000.000	APBD
2. Pengelolaan Mutasi ASN	Rp176.800.000	APBD

KEPALA BIDANG MUTASI



**RADEN RARA UTAMI RAHAJENG, S.H., M.M.**  
NIP. 19700113 198903 2 002

Semarang, 2023  
SUB KOORDINATOR PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN



**MUHARYO INDRO YULIANTO, S.Kom, M.Ak**  
NIP. 19790710 200501 1 001





# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

## BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Stadion Selatan No. 1 Telp. (024) 8319421, 845813, 8318846  
Fax. (024) 8318890, 8415548 SEMARANG 50136  
Email : bkd@jatengprov.go.id – Website : <http://bkd.jatengprov.go.id>

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KABUL SUTRIYONO, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Dan Kesejahteraan Pegawai  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. WISNU ZAROH, M.Si.

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang,

2023

Pihak Kedua,  
Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi Jawa Tengah

Drs. WISNU ZAROH, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19630526 199503 1 002

Pihak Pertama,  
Kepala Bidang Pembinaan dan  
Kesejahteraan Pegawai

KABUL SUTRIYONO, S.H., M.H.  
Pembina  
NIP. 19690513 198903 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BKD PROVINSI JAWA TENGAH**

**Unit Kerja : Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselesaikannya penanganan kasus kepegawaian	Presentase penanganan kasus kepegawaian	100%

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1. Program Kepegawaian Daerah	Rp1.780.895.000	APBD

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH



Drs. WISNU ZAROH, M.Si  
NIP. 19630526 199503 1 002

Semarang, 2023  
KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN  
KESEJAHTERAAN PEGAWAI



KABUL SUTRIYONO, S.H., M.H.  
NIP. 19690513 198903 1 005





# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Stadion Selatan No. 1 Telp. (024) 8319421, 845813, 8318846  
Fax. (024) 8318890, 8415548 SEMARANG 50136  
Email : bkd@jatengprov.go.id – Website : <http://bkd.jatengprov.go.id>

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGIL JOKO SARJONO, SH, MH

Jabatan : Sub Koordinator Pembinaan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KABUL SUTRIYONO, SH, MH

Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Pembinaan  
dan Kesejahteraan Pegawai

KABUL SUTRIYONO, SH, MH  
Pembina  
NIP. 19690513 198903 1 005

Semarang, 2023

Pihak Pertama,  
Sub Koordinator Pembinaan

AGIL JOKO SARJONO, SH, MH  
Penata Tingkat I  
NIP. 19820901 200912 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BKD PROVINSI JAWA TENGAH**

**Unit Kerja : Sub Koordinator Pembinaan**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN SUB KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<b>Terlaksananya penilaian kedisiplinan ASN</b>	<b>Persentase ASN yang dinilai kedisiplinannya</b>	<b>100%</b>
	Tersedianya Konsep Peraturan Bidang Kepegawaian	Jumlah konsep peraturan bidang kepegawaian	1 dokumen
	Terlaksananya Bimtek Pembinaan Disiplin PNS	Jumlah PNS yang diberikan bimtek pembinaan disiplin ASN	80 orang
	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS yang diberikan Sosialisasi peraturan perundang-undangan	120 orang
	Terselesaikannya Laporan/Aduan Kasus Kepegawaian	Jumlah Laporan/aduan kasus kepegawaian	30 kasus
	Terselesaikannya Penanganan Izin Perceraian PNS	Jumlah Penanganan izin perceraian PNS	70 berkas
	Tersedianya Rekomendasi/Klarifikasi Penanganan Kasus PNS	Jumlah rekomendasi/klarifikasi penanganan kasus PNS	60 kasus

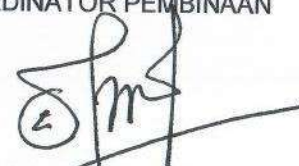
<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1. Pembinaan Disiplin ASN	Rp233.900.000	APBD
2. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Rp407.850.000	APBD

**KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN  
KESEJAHTERAAN PEGAWAI**



**KABUL SUTRIYONO, S.H., M.H.**  
NIP. 19690513 198903 1 005

Semarang, 2023  
SUB KOORDINATOR PEMBINAAN



**AGIL JOKO SARJONO, S.H., M.H.**  
NIP. 19820901 200912 1 002





# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Stadion Selatan No. 1 Telp. (024) 8319421, 845813, 8318846  
Fax. (024) 8318890, 8415548 SEMARANG 50136  
Email : bkd@jatengprov.go.id – Website : <http://bkd.jatengprov.go.id>

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUNG RAHARJO WIBOWO KUSUMO, S.E., M.M.

Jabatan : Sub Koordinator Kesejahteraan Pegawai

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KABUL SUTRIYONO, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Pembinaan dan  
Kesejahteraan Pegawai

KABUL SUTRIYONO, S.H., M.H.

Pembina

NIP 19690513 198903 1 005

Semarang, 2023

Pihak Pertama,  
Sub Koordinator Kesejahteraan Pegawai

AGUNG RAHARJO WIBOWO K, S.E., M.M.

Penata Tingkat I

NIP 19830607 201001 1 023

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BKD PROVINSI JAWA TENGAH**

**Unit Kerja : Sub Koordinator Kesejahteraan Pegawai**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN SUB KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<b>Terselesaikannya pemberian penghargaan SLKS bagi PNS</b>	<b>Persentase PNS yang mendapatkan penghargaan SLKS</b>	<b>100%</b>
	Terlaksananya Bimtek Kaderisasi Kepemimpinan PNS berbasis Gender	Bimtek Kaderisasi Kepemimpinan PNS berbasis Gender	50 orang
	Terselesaikannya Penanganan usulan jaminan kecelakaan kerja	Jumlah Penanganan usulan jaminan kecelakaan kerja	2 dokumen
	Terlaksananya Pembekalan bagi PNS yang memasuki masa purna tugas	Jumlah PNS yg mendapatkan pembekalan memasuki masa purna tugas	50 orang
	Terselesaikannya pemberian penghargaan SLKS bagi PNS	Jumlah PNS Pem Prov jateng yang mendapatkan penghargaan SLKS	100 orang
	Terselesaikannya usulan TK SLKS dari pemerintah provinsi dan kab/kota se-jawa tengah	Jumlah usulan TK SLKS dari pemerintah provinsi dan kab/kota se-jawa tengah	2000 berkas

<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Rp504.170.000	APBD
2. Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Rp134.975.000	APBD

**KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN  
KESEJAHTERAAN PEGAWAI**

  
**KABUL SUTRIYONO, S.H., M.H.**  
NIP. 19690513 198903 1 005

Semarang, Februari 2023  
SUB KOORDINATOR KESEJAHTERAAN PEGAWAI

  
**AGUNG RAHARJO WIBOWO K, S.E., M.M.**  
NIP. 19830607 201001 1 023





# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Stadion Selatan No. 1 Telp. (024) 8319421, 845813, 8318846  
Fax. (024) 8318890, 8415548 SEMARANG 50136  
Email : bkd@jatengprov.go.id – Website : <http://bkd.jatengprov.go.id>

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ESTU WIDODO, S.Sos., M.M.

Jabatan : Sub Koordinator Pengelolaan Korps Profesi ASN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KABUL SUTRIYONO, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Pembinaan dan  
Kesejahteraan Pegawai

KABUL SUTRIYONO, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19690513 198903 1 005

Semarang, 2023

Pihak Pertama,  
Sub Koordinator Pengelolaan Korps  
Profesi ASN

ESTU WIDODO, S.Sos., M.M.

Pembina

NIP. 19661210 198709 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BKD PROVINSI JAWA TENGAH**

**Unit Kerja : Sub Koordinator Kesejahteraan Pegawai**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN SUB KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya sosialisasi profesi ASN/Kode Etik	Persentase OPD yang mendapatkan sosialisasi Profesi ASN/Kode Etik	100%
	Terlaksanakanya pembinaan profesi/kode etik ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan profesi ASN/kode etik	150 orang
	Terlaksananya fasilitasi peringatan HUT KORPRI	Jumlah peserta apel siaga KORPRI	900 orang

<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Rp500.000.000	APBD

KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN  
KESEJAHTERAAN PEGAWAI



**KABUL SUTRIYONO, SH, M.H**  
NIP. 19690513 198903 1 005

Semarang, 2023  
SUB KOORDINATOR PENGELOLAAN KORPUS  
PROFESI ASN



**ESTU WIDODO, S.Sos, MM**  
NIP. 19661210 198709 1 001





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jl. Stadion Selatan No. 1 Telp. (024) 8319421, 845813, 8318846  
Fax. (024) 8318890, 8415548 SEMARANG 50136  
Email : bkd@jatengprov.go.id – Website : <http://bkd.jatengprov.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SODIKIN, S.Sos., M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Informasi Kepegawaian  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. WISNU ZAROH, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi Jawa Tengah

Drs. WISNU ZAROH, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19630526 199503 1 002

Semarang, 2023  
Pihak Pertama,  
Kepala Bidang Informasi Kepegawaian

SODIKIN, S.Sos., M.Si  
Pembina  
NIP. 19771008 201001 1 012

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BKD PROVINSI JAWA TENGAH**

**Unit Kerja : Bidang Informasi Kepegawaian**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Layanan Sistem Informasi Kepegawaian yang Cepat dan Terintegrasi	Persentase sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan	100%

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1. Program Kepegawaian Daerah	Rp1,187,204,000	APBD

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

  
**Drs. WISNU ZAROH, M.Si**  
NIP. 19630526 199503 1 002

Semarang, 2023  
KEPALA BIDANG INFORMASI KEPEGAWAIAN

  
**SODIKIN, S.Sos., M.Si.**  
NIP. 19771008 201001 1 012





# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Stadion Selatan No. 1 Telp. (024) 8319421, 845813, 8318846  
Fax. (024) 8318890, 8415548 SEMARANG 50136  
Email : bkd@jatengprov.go.id – Website : <http://bkd.jatengprov.go.id>

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KRISTIAWAN NURDIANTO, S.Kom, M.Kom

Jabatan : Sub Koordinator Pengelola Data dan Sistem Informasi Kepegawaian selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SODIKIN, S.Sos., M.Si.

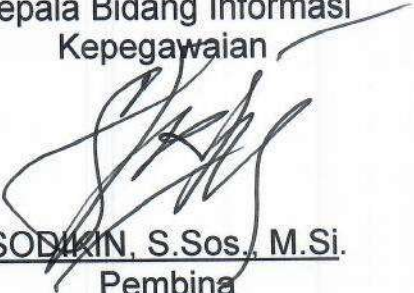
Jabatan : Kepala Bidang Informasi Kepegawaian selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Informasi  
Kepegawaian

  
SODIKIN, S.Sos., M.Si.  
Pembina

NIP. 19771008 201001 1 012

Semarang, 2023  
Pihak Pertama,  
Sub Koordinator Pengelola Data  
dan Sistem Informasi Kepegawaian

  
KRISTIAWAN NURDIANTO, S.Kom, M.Kom  
Pembina

NIP. 19801229 200501 1 004

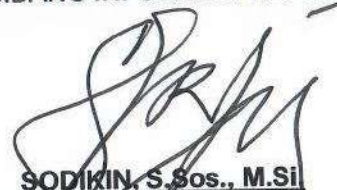
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BKD PROVINSI JAWA TENGAH**

Unit Kerja : Sub Koordinator Pengelola Data dan Sistem Informasi Kepegawaian

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Aplikasi sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan terintegrasi dengan sistem Simpeg	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian yang dikembangkan terintegrasi dengan sistem Simpeg	5 Aplikasi
2	Tekelolanya aplikasi portal kepegawaian yang dikembangkan	Jumlah aplikasi portal kepegawaian yang dikembangkan	1 buah
3	Terselenggaranya bintek pengembangan aplikasi simpeg	Jumlah bintek pengembangan aplikasi simpeg	1 kegiatan
4	Tersedianya dokumentasi profil kepegawaian	Jumlah dokumentasi profil kepegawaian	60 buku
5	Terselenggaranya rakor integrasi Simpeg dan SAPK	Jumlah rakor integrasi Simpeg dan SAPK	1 kegiatan
6	Terselenggaranya rakor penghubung untuk peningkatan pemahaman terhadap pengolahan data kepegawaian	Jumlah rakor penghubung untuk peningkatan pemahaman terhadap pengolahan data kepegawaian	6 kegiatan

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp838,334,000	APBD

KEPALA BIDANG INFORMASI KEPEGAWAIAN

  
**SODIKIN, S.Sos., M.Si**  
**NIP. 19771008 201001 1 012**

Semarang, 2023  
SUB KOORDINATOR PENGELOLA DATA DAN  
SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN

  
**KRISTIAWAN NURDIANTO, S.Kom, M.Kom**  
**NIP. 19801229 200501 1 004**





# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Stadion Selatan No. 1 Telp. (024) 8319421, 845813, 8318846  
Fax. (024) 8318890, 8415548 SEMARANG 50136  
Email : bkd@jatengprov.go.id – Website : <http://bkd.jatengprov.go.id>

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WARSONO, S.Sos., M.Si.

Jabatan : Sub Koordinator Dokumentasi Data Kepegawaian  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SODIKIN, S.Sos., M.Si.

Jabatan : Kepala Bidang Informasi Kepegawaian  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Informasi  
Kepegawaian

  
SODIKIN, S.Sos., M.Si.  
Pembina

NIP. 19771008 201001 1 012

Semarang, 2023  
Pihak Pertama,  
Sub Koordinator Dokumentasi Data  
Kepegawaian

  
WARSONO, S.Sos., M.Si.  
Penata Tingkat I

NIP. 19730617 200501 1 008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BKD PROVINSI JAWA TENGAH**

**Unit Kerja : Sub Koordinator Dokumentasi Data Kepegawaian**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN SUB KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1.</b>	<b>Tersedianya dokumen kepegawaian digital</b>	<b>Persentase dokumen digital kepegawaian yang ditargetkan</b>	<b>100%</b>
	Tersedianya data pegawai yang terdokumentasi secara digital	Jumlah data pegawai yang terdokumentasi secara digital	352500 dokumen
	Tersedianya data pegawai yang terdokumentasi secara fisik sesuai standard (menggunakan lactomapfolder)	Jumlah data pegawai yang terdokumentasi secara fisik sesuai standard (menggunakan lactomapfolder)	1800 buah
	Terselenggaranya Bintek dokumentasi data kepegawaian dengan SKPD	Jumlah pengembangan modul aplikasi atau Bintek dokumentasi data kepegawaian dengan SKPD (Bintek/aplikasi)	1 kegiatan

<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1. Pengelolaan Data Kepegawaian	Rp348,870,000	APBD

KEPALA BIDANG INFORMASI KEPEGAWAIAN



**SODIKIN, S.Sos., M.Si.**  
NIP. 19771008 201001 1 012

Semarang, 2023  
SUB KOORDINATOR DOKUMENTASI DATA  
KEPEGAWAIAN



**WARSONO, S.Sos., M.Si.**  
NIP. 19730617 200501 1 008





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jl. Stadion Selatan No. 1 Telp. (024) 8319421, 845813, 8318846  
Fax. (024) 8318890, 8415548 SEMARANG 50136  
Email : bkd@jatengprov.go.id – Website : <http://bkd.jatengprov.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. SUKARDI, M.Si  
Jabatan : Kepala Unit Penilaian Kompetensi ASN  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. WISNU ZAROH, M.Si  
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi Jawa Tengah

Drs. WISNU ZAROH, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19630526 199503 1 002

Semarang, 2023  
Pihak Pertama,  
Kepala Unit Penilaian Kompetensi ASN

Drs. SUKARDI, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690919 199001 1 001

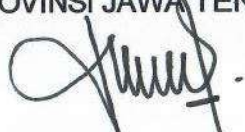
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BKD PROVINSI JAWA TENGAH**

**Unit Kerja : Unit Penilaian Kompetensi ASN**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya profil dan database kompetensi PNS	Persentase PNS yang terpetakan kompetensinya	100%
2.	Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100%

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1. Program Kepegawaian Daerah	Rp1.252.240.000	APBD
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp100.000.000	APBD

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**



**Drs. WISNU ZAROH, M.Si**  
**NIP. 19630526 199503 1 002**

Semarang, 2023  
**KEPALA UNIT PENILAIAN KOMPETENSI ASN**



**Drs. SUKARDI, M.Si**  
**NIP. 19690919 199001 1 001**





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jl. Stadion Selatan No. 1 Telp. (024) 8319421, 845813, 8318846  
Fax. (024) 8318890, 8415548 SEMARANG 50136  
Email : bkd@jatengprov.go.id – Website : http://bkd.jatengprov.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD ARIF ZAINUL FATAH, S.IP,M.Ec,Dev,MA

Jabatan : Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. SUKARDI, M.Si

Jabatan : Kepala Unit Penilaian Kompetensi ASN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Kepala Unit Penilaian Kompetensi  
ASN

Drs. SUKARDI, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690919 199001 1 001

Semarang, 2023  
Pihak Pertama,  
Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi

AHMAD ARIF Z.F., S.IP,M.Ec,Dev,MA  
Penata Tingkat I  
NIP. 19880611 200701 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BKD PROVINSI JAWA TENGAH**

**Unit Kerja : Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi**

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya hasil telaah Penilaian Kompetensi PNS	Persentase hasil Penilaian Kompetensi PNS yang ditelaah	100%
	Terlaksananya Pemetaan kompetensi PNS Pemprov Jateng	Jumlah PNS Pemprov Jateng yang terpetakan kompetensinya	2000 orang
	Tersedianya telaahan hasil penilaian PNS pemprov Jateng	Jumlah telaahan hasil penilaian PNS pemprov Jateng	2 dokumen
	Terlaksananya penyempurnaan metode penilaian kompetensi	Penyempurnaan metode penilaian kompetensi	1 dokumen

**Sub Kegiatan**

1. Pengelolaan Assessment Center

**Anggaran**  
Rp459.840.000

**Keterangan**  
APBD

KEPALA UNIT PENILAIAN  
KOMPETENSI ASN

**Drs. SUKARDI, M.Si.**  
NIP. 19690919 199001 1 001

Semarang, 2023  
SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN EVALUASI

**AHMAD ARIF ZAINUL FATAH, S.IP, M.Ec, Dev, MA**  
NIP. 19880611 200701 1 001





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jl. Stadion Selatan No. 1 Telp. (024) 8319421, 845813, 8318846  
Fax. (024) 8318890, 8415548 SEMARANG 50136  
Email : bkd@jatengprov.go.id – Website : <http://bkd.jatengprov.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BUDI SUSATYO, S.Sos., MM

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. SUKARDI, M.Si

Jabatan : Kepala Unit Penilaian Kompetensi ASN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Kepala Unit Penilaian Kompetensi  
ASN

Drs. SUKARDI, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690919 199001 1 001

Semarang, 2023  
Pihak Pertama,  
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

BUDI SUSATYO, S.Sos., MM  
Pembina  
NIP. 19651122 198603 1 008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BKD PROVINSI JAWA TENGAH**

**Unit Kerja : Sub Bagian Tata Usaha**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN SUB KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	100%
	Terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	12 Bulan
	Terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 Bulan

<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp30.000.000	APBD
2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp70.000.000	APBD

KEPALA UNIT PENILAIAN  
KOMPETENSI ASN

**Drs. SUKARDI, M.Si.**  
NIP. 19690919 199001 1 001

Semarang,

2023

SUB BAGIAN TATA USAHA

**BUDI SUSATYO, S.Sos., MM**  
NIP. 19651122 198603 1 008





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jl. Stadion Selatan No. 1 Telp. (024) 8319421, 845813, 8318846  
Fax. (024) 8318890, 8415548 SEMARANG 50136  
Email : bkd@jatengprov.go.id – Website : <http://bkd.jatengprov.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZM. SRI SUMARYANTI, S.Sos

Jabatan : Sub Koordinator Penilaian Kompetensi ASN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. SUKARDI, M.Si

Jabatan : Kepala Unit Penilaian Kompetensi ASN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Kepala Unit Penilaian Kompetensi  
ASN

Drs. SUKARDI, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690919 199001 1 001

Semarang, 2023  
Pihak Pertama,  
Sub Koordinator Penilaian Kompetensi  
ASN

ZM. SRI SUMARYANTI, S.Sos  
Penata Tingkat I  
NIP. 19660826 198702 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BKD PROVINSI JAWA TENGAH**

**Unit Kerja : Sub Koordinator Penilaian Kompetensi**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN SUB KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
<b>1.</b>	<b>Terselenggaranya pelaksanaan Uji Kompetensi</b>	<b>Persentase pelaksanaan Uji Kompetensi</b>	<b>100%</b>
	Terlaksananya penilaian kompetensi manajerial bagi Pejabat administrator dan Pengawas Pem Kab/Kota	Jumlah Pejabat administrator dan Pengawas Pem Kab/Kota yang dinilai kompetensi manajerialnya	225 orang
	Terlaksananya penilaian potensi dan kompetensi bagi PNS Pemerintah Kab/Kota	Jumlah PNS Pemerintah Kab/Kota yang dinilai potensi dan kompetensinya	40 orang
	Terlaksananya Penilaian potensi dan kompetensi bagi PNS Pemprov Jateng yang dinilai	Jumlah PNS Pemprov Jateng yang dinilai potensi dan kompetensinya	280 orang

<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1. Pengelolaan Assessment Center	Rp792.400.000	APBD

**KEPALA UNIT PENILAIAN  
KOMPETENSI ASN**

**Drs. SUKARDI, M.Si.**  
**NIP. 19690919 199001 1 001**

Semarang, 2023  
SUB KOORDINATOR PENILAIAN KOMPETENSI

**ZM SRI SUMARYANTI, S.Sos**  
**NIP. 19660826 198702 2 002**





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jl. Stadion Selatan No. 1 Telp. (024) 8319421, 845813, 8318846  
Fax. (024) 8318890, 8415548 SEMARANG 50136  
Email : bkd@jatengprov.go.id – Website : <http://bkd.jatengprov.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAHMAH NUR HAYATI, SKM, M.Kes  
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. NANA SUDJANA, MM  
Jabatan : Pj. Gubernur Jawa Tengah  
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

Drs. NANA SUDJANA, MM

Semarang, 17 November 2023  
Pihak Pertama,  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

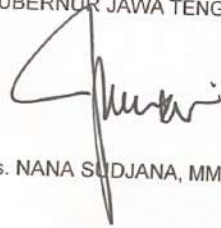
RAHMAH NUR HAYATI, SKM, M.Kes  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680520 199203 2 005

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Tujuan</b>			
2.	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	89
<b>Sasaran</b>			
2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	89
2.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	81



Program	Anggaran	Keterangan
1. Kepegawaian Daerah	Rp 14.597.936.000,-	APBD
2. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 32.921.320.000,-	APBD

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH



Drs. NANA SUDJANA, MM

Semarang, 17 November 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH



RAHMAH NUR HAYATI, SKM, M.Kes  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680520 199203 2 005